KEPATUHAN SWEDIA TERHADAP KERANGKA KEBIJAKAN *EUROPEAN GREEN DEAL* DALAM MITIGASI EMISI GAS RUMAH KACA SWEDIA TAHUN 2019-2025

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

SAIPUL BAHRI

22323091

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

Kepatuhan Swedia Terhadap Kerangka Kebijakan *European Green Deal* dalam Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Swedia Tahun 2019-2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

SAIPUL BAHRI

22323091

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Kepatuhan Swedia terhadap Kerangka Kebijakan *European Green Deal* dalam Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Swedia Tahun 2019-2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

31 Agustus 2026

Mengesahkan,

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
2	Dewi Masitoh, S.Hub.Int., M.Sos.	
3	Alfredha Shinta Putri S.IP., M.H.I.	

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saipul Bahri
Tempat dan Tanggal Lahir : Basilam Baru 23-11-2003
Alamat : Jl. Syech Zainudin RT 003 Kec. Sungai Sembilan
NIM : 22323091
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Agustus 2026



Saipul Bahri

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....iv
DAFTAR ISI.....v
DAFTAR TABEL.....vii
DAFTAR GRAFIK.....viii
ABSTRAK.....ix
BAB 1
PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....5
1.3 Tujuan Penelitian.....5
1.4 Cakupan Penelitian.....5
1.5 Tinjauan Pustaka.....6
1.6 Kerangka Pemikiran.....11
1.7 Argumen Sementara.....15
1.8 Metode Penelitian.....16
1.8.1 Jenis Penelitian.....*16*
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....*16*
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....*16*
1.8.4 Proses Penelitian.....*16*
1.9 Sistematika Pembahasan.....17
BAB 2.....19
PERUBAHAN IKLIM DI SWEDIA DAN POSISI SWEDIA DI *EUROPEAN GREEN DEAL*.....19
2.1 Perubahan Iklim di Swedia.....19
2.2 *European Green Deal*.....23
2.3 Posisi Swedia di *European Green Deal*.....25
2.4 Kebijakan Lingkungan Swedia Sebelum Kesepakatan *European Green Deal*.....28
BAB 3.....33
KEPATUHAN SWEDIA TERHADAP KERANGKA KEBIJAKAN *EUROPEAN GREEN DEAL* DALAM MITIGASI EMISI GAS RUMAH KACA SWEDIA TAHUN 2019-2025.....33
3.1 *Outputs*.....34
3.2 *Outcome*.....40
3.3 *Impacts*.....44
3.4 Kategori Kepatuhan Swedia berdasarkan *Compliance Theory*.....49

BAB 4.....54
PENUTUP.....54
4.1 Kesimpulan..... 53
4.2 Rekomendasi..... 57
DAFTAR PUSTAKA.....59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori dan Indikator Teori Kepatuhan.....13
Tabel 2. Perbandingan Sebelum EGD dan Sesudah EGD..... 38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Emisi GRK Swedia.....23
Grafik 2. Total Emisi Gas Rumah Kaca.....46

ABSTRAK

Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi kawasan Eropa, mendorong Uni Eropa meluncurkan *European Green Deal* pada 2019 sebagai kerangka kebijakan untuk mencapai netralitas karbon pada 2050. Penelitian ini membahas bagaimana kepatuhan Swedia terhadap kerangkaa kebijakan EGD dalam mitigasi emisi gas rumah kaca tahun 2019-2025, mengingat Swedia dikenal sebagai salah satu negara pelopor kebijakan iklim di Eropa namun juga mengalami dinamika politik domestik yang berpotensi mempengaruhi konsistensi implementasi kebijakan nya. Penelitian ini menggunakan *Compliance Theory* dari Ronald B.Mitchell, dengan indikator analisis yaitu *outputs, outcomes* dan *impacts*, untuk mengidentifikasi kategori kepatuhan Swedia. Argumen sementara penelitian ini memperkirakan bahwa Swedia menunjukan tingkat kepatuhan terhadap EGD yang mengarah pada kategori *treaty induce compliance*. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah kualitatif dengan teknik studi literatur dari jurnal, buku dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Swedia secara konsisten menyelaraskan regulasi domestik seperti climate act dan revisi ESR dengan target EGD, meskipun sempat mengalami pelemahan kebijakan pasca pergantian pemerintah pada 2022. Namun demikian, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 38% sejak 1990 hingga 2023 membuktikan bahwa Swedia tetap konsisten berada dalam kategori *treaty induce compliance*.

Kata-kata kunci:Kepatuhan negara, *European Green Deal*, mitigasi emisi gas rumah kaca , Swedia, *Compliance Theory*, emisi gas rumah kaca.

ABSTRACT

Climate change poses a serious threat to Europe, prompting the European Union to launch the European Green Deal in 2019 as a policy framework for achieving carbon neutrality by 2050. This study examines Sweden's compliance with the EGD framework regarding climate change mitigation between 2019 and 2025; while Sweden is a pioneer in European climate policy, it also experiences domestic political dynamics that could potentially affect the consistency of its policy implementation. The study employs Ronald B. Mitchell's Compliance Theory using outputs, outcomes, and impacts as analytical indicators to categorize Sweden's compliance. The preliminary argument posits that Sweden demonstrates a level of compliance with the EGD that falls into the category of "treaty-induced compliance." A qualitative research method was used, utilizing a literature review of journals, books, and official documents. The findings indicate that Sweden has consistently aligned domestic regulations such as the Climate Act and revisions to the Effort Sharing Regulation (ESR) with EGD targets, despite a temporary weakening of policies following the change of government in 2022. Nevertheless, the 38% reduction in greenhouse gas emissions between 1990 and 2023 confirms that Sweden has remained consistently within the category of treaty-induced compliance.

***Keywords**: State compliance, European Green Deal, climate change mitigation, Sweden, Compliance Theory, greenhouse gas emission*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan salah satu persoalan lingkungan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan manusia dan keberlangsungan lingkungan. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan iklim. Aktivitas manusia, khususnya penggunaan bahan bakar fosil dalam sektor energi, transportasi, industri, serta perubahan penggunaan lahan, berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (BBC News Indonesia 2024). Kondisi tersebut mendorong negara-negara untuk melakukan berbagai upaya mitigasi melalui pengurangan emisi dan perubahan pada sistem energi maupun sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan emisi tinggi.

Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tidak hanya dilakukan melalui kebijakan nasional, tetapi juga melalui kerja sama internasional dan regional. Dalam konteks Eropa, Uni Eropa merupakan salah satu aktor yang mengembangkan kebijakan bersama untuk merespons perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu kebijakan utama yang dikembangkan oleh Uni Eropa adalah *European Green Deal* (EGD) yang diperkenalkan oleh Komisi Eropa pada tahun 2019. *European Green Deal* merupakan kerangka kebijakan yang diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan Uni Eropa menuju ekonomi yang berkelanjutan serta mencapai netralitas iklim pada tahun 2050. Dalam kerangka tersebut, Uni Eropa

menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sekurang-kurangnya 55 persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990 (European Commission 2019; Fetting 2020).

Implementasi *European Green Deal* kemudian dikembangkan melalui berbagai kebijakan dan instrumen yang berkaitan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satunya adalah *Fit for 55* yang mencakup penyesuaian sejumlah instrumen kebijakan Uni Eropa, termasuk *EU Emissions Trading System* (EU ETS), *Effort Sharing Regulation* (ESR), serta *Land Use, Land-Use Change and Forestry* (LULUCF). Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada tingkat Uni Eropa, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan oleh negara-negara anggota melalui kebijakan dan tindakan di tingkat nasional. Oleh karena itu, pencapaian tujuan *European Green Deal* tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa, tetapi juga pada sejauh mana negara anggota melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan kerangka tersebut (Consilium, n.d.; Regeringskansliet 2023).

Salah satu negara anggota Uni Eropa yang cocok untuk diteliti dalam konteks tersebut adalah Swedia. Swedia telah memiliki kebijakan lingkungan dan iklim sebelum *European Green Deal* diperkenalkan pada tahun 2019. Pemerintah Swedia sebelumnya telah menerapkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan emisi, antara lain pajak karbon, *Environmental Code*, serta *Swedish Climate Policy Framework* (Naturvardsverket 2025*)*. Kerangka kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui *Climate Act* yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan iklim Swedia. Dengan demikian, upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Swedia bukan merupakan kebijakan yang baru muncul setelah *European*

Green Deal, melainkan telah berkembang melalui kebijakan nasional sebelum terbentuknya kerangka kebijakan tersebut (Regeringskansliet 2018).

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Swedia dipilih sebagai objek penelitian. Keberadaan kebijakan pengurangan emisi sebelum tahun 2019 menyebabkan kesesuaian antara kebijakan Swedia dan EGD tidak dapat secara langsung dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap EGD. Kesamaan arah kebijakan tersebut dapat pula merupakan keberlanjutan dari kebijakan nasional yang telah dibentuk sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk melihat apakah kebijakan Swedia setelah EGD menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kerangka kebijakan Uni Eropa atau hanya melanjutkan komitmen nasional yang telah ada. Selain memiliki kebijakan yang telah berkembang sebelum EGD, Swedia juga menetapkan target pengurangan emisi yang relatif ambisius. Swedia menetapkan target untuk mencapai emisi gas rumah kaca *net-zero* pada tahun 2045 (Swedish Sverige 2025). Selain itu, Swedia memiliki target pengurangan emisi sektor transportasi domestik sebesar 70 persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 2010. Target tersebut menunjukkan bahwa Swedia memiliki komitmen nasional yang kuat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pelaksanaan kebijakan mitigasi emisi di Swedia tidak berlangsung tanpa perubahan. Pergantian pemerintahan pada tahun 2022 membawa perubahan terhadap sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan emisi. Beberapa kebijakan mengalami pelemahan, antara lain penurunan pajak bahan bakar fosil, pelonggaran kewajiban pencampuran biofuel, dan penghapusan sistem bonus-malus. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan

emisi di Swedia juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi politik domestik (Bäckstrand 2025). Meskipun Swedia memiliki kerangka hukum dan kebijakan iklim yang telah berkembang, pelaksanaannya tetap menghadapi dinamika akibat perubahan arah kebijakan pemerintah.

Perubahan tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena periode penelitian 2019-2025 mencakup dua kondisi politik yang berbeda. Periode tersebut dimulai ketika EGD diperkenalkan pada tahun 2019 dan berlanjut hingga setelah terjadinya pergantian pemerintahan Swedia pada tahun 2022. Kondisi ini memberikan ruang untuk melihat perkembangan kebijakan pengurangan emisi Swedia dalam hubungannya dengan EGD, sekaligus melihat apakah perubahan politik domestik mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang telah disesuaikan dengan kerangka kebijakan Uni Eropa.

Dalam penelitian ini, kepatuhan Swedia tidak hanya dilihat dari keberadaan kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan EGD, tetapi juga dari pelaksanaan kebijakan dan perubahan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Compliance Theory* yang dikembangkan oleh Ronald B. Mitchell. Mitchell memandang kepatuhan tidak hanya berdasarkan persetujuan formal suatu negara terhadap suatu kesepakatan, tetapi juga berdasarkan pelaksanaan dalam kebijakan domestik dan pencapaian tujuan yang berkaitan dengan kesepakatan tersebut. Mitchell membedakan kepatuhan ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah *Treaty-Induced Compliance*, yaitu kepatuhan yang muncul sebagai akibat dari adanya kesepakatan internasional. Dalam menganalisis kepatuhan, Mitchell juga menggunakan tiga indikator, yaitu output, outcome, dan

impact, yang dapat digunakan untuk melihat perubahan kebijakan, perubahan perilaku atau pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan (Mitchell 2007).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan *European Green Deal* dalam mitigasi emisi gas rumah kaca Swedia tahun 2019-2025 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis Swedia terhadap kerangka kebijakan *European Green Deal* dalam mitigasi emisi gas rumah kaca Swedia tahun 2019-2025.
2. Mengidentifikasi penyesuain kebijakan dan tindakan mitigasi gas rumah kaca yang dilakukan Swedia dalam merespons kerangka *European Green Deal* tahun 2019-2025.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini mencangkup analisis implementasi kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan EGD dalam kebijakan mitigasi emisi gas rumah kaca Swedia tahun 2019-2025. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana Swedia mengadopsi dan melaksanakan kebijakan serta mekanisme yang sejalan dengan EGD untuk menghadapi tantangan krisis iklim terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Tahun 2019 dipilih sebagai titik awal karena pada 11 Desember 2019 Komisi Eropa memperkenalkan EGD sebagai kerangka kebijakan utama Uni Eropa untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050. EGD juga menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sekurang-kurangnya 55 persen pada

tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990. Setelah diperkenalkan, EGD diperkuat melalui *European Climate Law* pada tahun 2021 dan paket kebijakan *Fit for 55*. Paket tersebut mencakup beberapa kebijakan penting, seperti EU ETS, ESR, dan LULUCF. Perkembangan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis penyesuaian dan pelaksanaan kebijakan pengurangan emisi di Swedia.

Tahun 2025 digunakan sebagai batas akhir penelitian karena memberikan waktu yang cukup untuk melihat perkembangan pelaksanaan kebijakan EGD di Swedia sejak tahun 2019. Periode ini juga mencakup perubahan kebijakan setelah pergantian pemerintahan Swedia pada tahun 2022 serta perkembangan pelaksanaan kebijakan *Fit for 55*. Selain itu, pada tahun 2023 Uni Eropa memperkuat aturan ESR dan LULUCF sebagai bagian dari pelaksanaan *Fit for 55*. Oleh karena itu, periode 2019-2025 dipilih untuk menganalisis perkembangan kepatuhan Swedia sejak EGD diperkenalkan, proses penyesuaian kebijakan di tingkat Uni Eropa dan nasional, serta pelaksanaan kebijakan dan perkembangan upaya mitigasi emisi gas rumah kaca di Swedia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Vela Almeida et al berjudul *The Greening of Empire: The European Green Deal as the EU First Agenda, European Green Deal* merupakan inisiatif strategis Uni Eropa untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 dan menurunkan gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan tingkat emisi tahun 1990 (Vela Almeida et al. 2023).

Jurnal ini juga menyebut bahwa *European Green Deal* diposisikan sebagai strategi pertumbuhan baru yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan daya saing ekonomi dan kepemimpinan geopolitik Uni Eropa. Kebijakan *European Green Deal* tidak hanya mencerminkan orientasi lingkungan melainkan sarana Uni Eropa untuk membangun ulang posisi dominan di tatanan global. Dalam jurnal ini mencoba untuk memberi perspektif kritis mengenai kebijakan *European Green Deal,* menyoroti bagaimana kebijakan tersebut berjalan, walaupun kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi krisis iklim namun dapat dilihat juga sebagai kelanjutan dari hubungan kolonial dan neokolonial dan bagaimana upaya Uni Eropa untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan politik (Vela Almeida et al. 2023, 4-9).

Danuta Szoilko dan Joanna Ejdys menulis bahwa *European Green Deal* bukan hanya sebagai sebuah instrumen mitigasi krisis lingkungan, namun juga terintegrasi dengan agenda Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk pembangunan berkelanjutan. Danuta Szoilko dan Joanna Ejdys dałam penelitiannya yang berjudul "*European Green Deal Research Direction A Systematic Literature Review"* menulis kebijakan *European Green Deal* yang diadopsi oleh Uni Eropa merupakan respon terhadap degradasi lingkungan untuk mencapai netralitas iklim Uni Eropa pada tahun 2050. Respon strategis terhadap 12 tantangan lingkungan kritis yang ditetapkan Badan Lingkungan Eropa yakni, perubahan iklim, polusi udara,air, tanah, hilangnya biodiversitas dan tekanan pada sumber daya air yang mana strategi ini bertujuan untuk transformasi Uni Eropa menjadi ekonomi netral iklim pada 2050 (Ejdys and Szpilko 2022).

Dalam konteks Swedia, Zbyněk Dubský, Marketa Votoupalapo dan Alzbeta Viktopa dalam penelitian yang berjudul *"Framing the European Green Deal:Political and Media Energy Discourse in Cheznia and Sweden"* menulis EGD secara konsisten dirancang sebagai peluang untuk inovasi dan tanggung jawab global terhadap iklim. Wacana ini memperkuat legitimasi sosial dan politik bagi kebijakan transisi hijau yang sejalan dengan kerangka hukum domestik Swedia seperti *Climate Policy Framework* dan *Climate Act* yang menetapkan target netral karbon tahun 2045. Framing positif ini juga mendorong penerapan prinsip EGD dalam kebijakan domestik Swedia seperti penerapan *National Energy and Climate Plan* (NECP) 2021-2030 serta strategi elektrifikasi dan energi terbarukan (Dubsky et al 2025).

Dalam jurnal ini juga menerangkan bahwa wacana dan dukungan terhadap EGD tetap stabil walaupun pada tahun pandemi seperti COVID-19 dan perang Rusia dan Ukraina. Dalam hal ini, Swedia memiliki daya tahan institusional (daya tahan politik) yang mendukung pelaksanaan kebijakan mitigasi iklim. Berbeda dengan negara eropa lainya yang menerapkan isu perubahan iklim dalam kerangka Securitization dalam hal ini Swedia lebih menekankan prinsip moral, inovasi dan tanggung jawab lingkungan yang politik yang mendukung pelaksanaan EGD (Dubský et al 2025).

Jurnal lain yang ditulis oleh Backstrand (2025) berjudul "*Democracy and the Implementation of the European Green Deal: Comparing Denmark and Sweden"* menulis mengenai pengaruh legitimasi publik dan demokratis terhadap pelaksanaan EGD di negara anggota Uni Eropa dengan perhatian khusus pada perbandingan antara Denmark dan Swedia. Jurnal ini menjelaskan bahwa Swedia

mengalami defisit implementasi kebijakan mitigasi iklim sedangkan Denmark menunjukan peningkatan ambisi dan kinerja yang lebih konsisten dalam penerapan *Fit For* 55 (Bäckstrand 2025, 285) .

Secara institusi, Swedia memiliki kerangka hukum iklim melalui *Framework Policy Climate dan National Energy and Climate Plan* (NECP). Namun, sebagai akibat dari perubahan situasi politik nasional Swedia, kebijakan mitigasi mengalami penurunan sejak 2022. Penurunan pajak bahan bakar fosil, pelongaran kewajiban campuran biofuel dan penghapusan sistem bonus - malus merupakan beberapa contoh kebijakan penting yang dihapus oleh pemerintah liberal konservatif yang didukung oleh partai populis Sverigedemokraterna. Hal ini menyebabkan pencapain target iklim nasional Swedia mengalami penurunan (Bäckstrand 2025, 288).

Penelitian Backstrand menunjukan bahwa keberhasilan pelaksanaan EGD tidak hanya bergantung pada kemampuan teknokratis dan alat kebijakan tetapi juga pada tingkat tata kelola demokratis yang memastikan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam contoh kasus Swedia menunjukan bahwa kurangnya pertimbangan demokratis dapat menghambat pelaksanaan kebijakan mitigasi emisi gas rumah kaca dalam kerangka EGD.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penelitian mengenai EGD di Swedia telah membahas berbagai aspek, seperti implementasi kebijakan, wacana politik, legitimasi publik, demokrasi, dan tata kelola. Penelitian Dubský et al. (2025), misalnya, mengkaji bagaimana EGD dibingkai dalam wacana politik dan media di Swedia serta keterkaitannya dengan kebijakan transisi energi dan iklim nasional. Sementara itu, Bäckstrand (2025) membahas

implementasi EGD di Swedia melalui perbandingan dengan Denmark dengan menekankan aspek legitimasi publik, demokrasi, dan tata kelola. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan dan implementasi EGD di Swedia, termasuk adanya perubahan kebijakan setelah pergantian pemerintahan pada tahun 2022. Namun, penelitian tersebut belum menempatkan kepatuhan negara sebagai fokus utama dalam menganalisis hubungan antara European Green Deal dan kebijakan mitigasi emisi gas rumah kaca Swedia.

Novelty penelitian ini terdapat pada penggunaan *Compliance Theory* Ronald B. Mitchell untuk menganalisis kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan EGD. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek implementasi, wacana, dan tata kelola, penelitian ini menganalisis kepatuhan melalui tiga indikator yang dalam *compliance theory*, yaitu *output, outcome, dan impact*. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian kebijakan dan regulasi Swedia dengan kerangka EGD, pelaksanaan kebijakan serta perubahan yang terjadi, dan perkembangan dampaknya terhadap mitigasi emisi gas rumah kaca. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode 2019-2025 yang mencakup sejak diperkenalkannya EGD hingga perkembangan kebijakan setelah pergantian pemerintahan Swedia pada tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kebijakan Swedia yang sejalan dengan EGD tetapi juga menganalisis apakah kesesuaian tersebut menunjukkan bentuk *Treaty-Induced Compliance* berdasarkan kerangka analisis Ronald B. Mitchell.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori kepatuhan (*Compliance Theory)* yang ditulis oleh Ronald Mitchell sebagai dasar analisis untuk meneliti kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan *European Green Deal* dalam mitigasi emisi gas rumah kaca Swedia Tahun 2019-2025. Mitchell memiliki anggapan bahwa negara berfungsi sebagai sebuah aktor yang rasional yang menetapkan tingkat kepatuhan melalui analisis kepentingan, reputasi dan pertimbangan norma. Maka dengan itu, kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai persetujuan resmi terhadap suatu kesepakatan, namun juga melibatkan pelaksanaan yang konkret dalam kebijakan dalam negeri serta pencapaian tujuan dari kesepakatan itu. Dalam bukunya, Mitchell membagi kepatuahan menjadi empat jenis kepatuhan, yaitu: kepatuhan yang dipicu perjanjian *(Treaty-Induced Compliance),* kepatuhan kebetulan *(Coincidental Compliance),* ketidakpatuhan dengan itikad baik *(Good Faith Non-Compliance)* dan ketidakpatuhan yang disengaja *(Intentional Non-Compliance)* (Mitchell 2007, 895).

Dalam menganalisis bentuk kepatuhan suatu negara, Mitchell mengusulkan adanya tiga indikator yang bisa digunakan sebagai alat dalam menganalisis kepatuhan suatu negara terhadap sebuah kesepakatan yaitu, *Output, Outcome dan Impact*. *Output* adalah seperangkat aturan, kebijakan dan regulasi yang diadopsi oleh negara dalam implementasi kesepakatan, yang kemudian diterapkan dari ranah internasional ke dalam ranah kebijakan nasional. *Outcomes* adalah perubahan dalam perilaku pemerintah atau aktor aktor terkait sebagai

akibat dari implementasi kesepakatan yang telah diadopsi yang dapat dilihat melalui pelaksanaan kebijakan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi maupun perubahan dalam mendukung tujuan kesepakatan. Sedangkan *impact* merupakan hasil akhir dari implementasi kebijakan yang ditunjukan melalui pencapaian tujuan mitigasi emisi gas rumah kaca , seperti penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan penggunaan energi terbarukan dan target iklim yang ditetapkan dalam kesepakatan (Mitchell 2007, 896). Penulis akan menjelaskan melalui sebuah tabel berikut:

Tabel 1. Kategori dan Indikator Teori Kepatuhan

Kategori Kepatuhan	*Outputs*	*Outcomes*	*Impacts*
Treaty Induced Compliance	Kepatuhan muncul karena berasal dari negara yang telah memutuskan untuk mengikuti suatu kesepakatan dan mengimplementasikan ke hukum domestik berupa UU kebijakan ataupun peraturan.	Negara mengambil suatu tindakan yang menunjukan kepatuhan dari kesepakatan yang telah disepakati.	Masyarakat dapat merasakan dampak dari tindakan tindakan yang telah dilaksanakan.
Coincidental Compliance	Kebijakan negara telah selaras dengan kesepakatan karena kebijakan nasional negara yang telah ada sebelumnya. Negara patuh (berdasarkan kesepakatan) tetapi dari perspektif non-hukum, negara tersebut karena alasan lain.	Terjadinya keselarasan kebijakan, namun perubahan tersebut merupakan kelanjutan dari komitmen nasional Negara yang sudah berjalan sebelumnya.	Perubahan kualitas lingkungan secara tidak sengaja saat mencapai tujuan kepentingan negara namun tidak banyak. Hanya perubahan untuk mencapai tujuan negara.
Good faith non Compliance	Tidak ada penerapan kesepakatan rezim internasional kedalam hukum nasional. Tidak ada ratifikasi dari negara dan biasanya negara tidak ikut berpartisipasi dalam kesepakatan rezim internasional, namun negara memiliki pandangan positif terhadap tujuan rezim internasional.	Terdapat perubahan perilaku oleh aktor negara, namun tidak benar-benar untuk mencapai tujuan kesepakatan rezim internasional.Upaya yang dilakukan hanya sebatas untuk kepentingan negara	Terdapat perubahan lingkungan, namun tidak untuk mencapai target dari kesepakatan rezim internasional karena perubahan yang ada hanya sebatas untuk mencapai kepentingan negara.
Intentional non Compliance	Tidak ada penerapan kesepakatan rezim internasional kedalam hukum nasional. Tidak ada ratifikasi dari negara dan biasanya negara tidak ikut berpartisipasi dalam kesepakatan rezim internasional.	Tidak ada perubahan perilaku dari negara dan aktor-aktor yang terlibat dan tidak ada upaya apapun.	Tidak ada perubahan lingkungan dan negara tidak memenuhi target kesepakatan rezim internasional.

Sumber*:* (Mitchell, 2007)

Dalam penelitian ini memfokuskan menggunakan tipologi *Treaty-Induced Compliance* karena analisis diarahkan untuk melihat apakah penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan mitigasi emisi gas rumah kaca di Swedia selama periode 2019-2025 berkaitan dengan keberadaan dan perkembangan kerangka kebijakan *European Green Deal*. Tipologi ini digunakan sebagai kategori analisis untuk menilai kepatuhan yang muncul karena adanya pengaruh dari suatu kesepakatan atau aturan internasional terhadap perilaku negara. Dengan menggunakan tipologi tersebut, penelitian dapat menelusuri keterkaitan antara kerangka kebijakan EGD dengan perubahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan hasil mitigasi emisi gas rumah kaca di Swedia.

Pemilihan satu tipologi karena untuk fokus dan batasan penelitian, *Coincidental Compliance* tidak ditempatkan sebagai kategori utama karena penelitian tidak berfokus pada kepatuhan yang terjadi karena kebetulan atau karena kebijakan domestik yang tidak berkaitan dengan EGD. Sementara itu, *Good Faith Non-Compliance* dan *Intentional Non-Compliance* merupakan kategori yang digunakan untuk menjelaskan bentuk ketidakpatuhan, sedangkan penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan EGD. Oleh karena itu, *Treaty-Induced Compliance* dipilih sebagai satu-satunya tipologi yang digunakan sebagai kategori utama dalam penelitian.

Penggunaan satu tipologi bukan berarti penelitian mengabaikan keberadaan tiga tipologi lainnya dalam buku Mitchell. Keempat tipologi tetap dijelaskan sebagai bagian dari kerangka teoritis untuk menunjukkan posisi *Treaty Induced Compliance* dalam teori kepatuhan Mitchell. Namun, untuk kepentingan

analisis, penelitian membatasi penggunaan tipologi pada *Treaty-Induced Compliance* agar pembahasan tetap sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian yang telah ditetapkan**.**

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori, penelitian ini memiliki argumen sementara bahwa Swedia cenderung menunjukkan kepatuhan terhadap pelaksanaan EGD dalam upaya mitigasi emisi gas rumah kaca selama periode 2019-2025. Dugaan ini didasarkan pada komitmen Swedia dalam mengurangi emisi serta penyesuaian kebijakan nasional terhadap arah kebijakan iklim Uni Eropa. Pada indikator *output,* kepatuhan tersebut dapat dilihat melalui regulasi, strategi, dan instrumen kebijakan terkait pengurangan emisi, energi terbarukan, efisiensi energi, dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Penyesuaian tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan nasional Swedia dan tujuan EGD, bahkan beberapa target nasional Swedia lebih ambisius dibandingkan target minimum Uni Eropa.

Pada indikator *outcome*, pelaksanaan kebijakan diduga tercermin melalui pengembangan energi terbarukan, investasi teknologi rendah emisi, pembangunan infrastruktur rendah karbon, serta penguatan kebijakan dekarbonisasi. Pelaksanaan tersebut turut didukung oleh faktor domestik, seperti kapasitas birokrasi, dukungan publik, dan kerja sama pemerintah dengan sektor industri. Selain itu, indikator *impact* dilihat melalui perkembangan capaian pengurangan emisi gas rumah kaca selama periode penelitian. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, kepatuhan Swedia diduga cenderung termasuk kategori *Treaty-Induced*

Compliance. Namun, dugaan ini masih perlu dibuktikan melalui analisis terhadap *output, outcome, dan impact* serta keterkaitan antara EGD dan kebijakan mitigasi emisi di Swedia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam menganalisis judul ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sekunder. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mencari sumber atau data yang dari penemuan penemuan sebelumnya, lalu menganalisis isu tulisan tersebut.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah negara Swedia dan objek dari penelitian ini adalah kepatuhan kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan *European Green Deal* dalam emisi gas rumah kaca tahun 2019-2025.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur. Data yang didapat oleh penulis dalam proposal penelitian ini didapatkan melalui jurnal artikel, buku, dokumen resmi, website dan media online yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan analisis terlebih dahulu pada isu yang akan diangkat dalam penelitian ini dengan cara mencari sumber sumber akurat yang membahas mengenai isu judul penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB 1: Pendahuluan

Bab 1 memaparkan latar belakang penelitian terkait kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan *European Green Deal* dalam mitigasi emisi gas rumah kaca Swedia tahun 2019-2025. Kemudian dapat ditarik sebuah pertanyaan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dalam penelitian ini direlevansikan dengan teori kepatuhan dalam Hubungan Internasional. Metode penelitian, menggunakan metode kualitatif dari berbagai sumber referensi seperti, buku, jurnal dan berbagai sumber yang akurat dari Internet.

BAB 2: Perubahan Iklim di Swedia dan *European Green Deal*

Dalam bab 2 akan membahas mengenai EGD sebagai kebijakan Iklim Uni Eropa yang meliputi sejarah, tujuan dan target. Dalam bab ini juga akan menguraikan mengenai kebijakan mitigasi emisi gas rumah kaca yang diterapkan oleh Swedia yang merupakan komitmen iklim nasional Swedia sebelum dan sesudah dikeluarkannya EGD dan keterkaitannya dengan agenda hijau Uni Eropa.

BAB 3: Analisis Kepatuhan Swedia terhadap Kerangka Kebijakan *European Green Deal* dalam Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Swedia Tahun 2019-2025

Bab 3 menganalisis bentuk kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan *European Green Deal* dalam mitigasi emisi gas rumah kaca Swedia tahun 2019-2025 dengan memfokuskan pada penerapan kebijakan, program dan

regulasi yang sejalan dengan EGD. Analisis dilakukan menggunakan teori *compliance* dari Mitchell untuk melihat tingkat kepatuhan Swedia terhadap EGD.

BAB 4: Penutup

Dalam bab ini, memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran berupa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk penelitian mengenai topik ini selanjutnya.

BAB 2

PERUBAHAN IKLIM DI SWEDIA DAN POSISI SWEDIA DI *EUROPEAN GREEN DEAL*

Dalam bab 2 ini, membahas mengenai perubahan iklim di Swedia dan posisi Swedia di EGD sebagai kebijakan Iklim Uni Eropa yang meliputi sejarah, tujuan dan target. Dalam bab ini juga akan menguraikan mengenai kebijakan mitigasi emisi gas rumah kaca yang diterapkan oleh Swedia yang merupakan komitmen iklim nasional Swedia sebelum dan sesudah dikeluarkannya EGD dan keterkaitannya dengan agenda hijau Uni Eropa.

2.1 Perubahan Iklim di Swedia

Fenomena perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia yang ditandai dengan perubahan yang terus berkelanjutan dalam pola suhu dan cuaca di Bumi. Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim didefinisikan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) sebagai perubahan signifikan pada kondisi iklim yang terjadi dalam jangka waktu panjang, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun faktor alam. Dalam kebijakan publik dan diplomasi internasional, perubahan iklim saat ini dianggap sebagai masalah yang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial dan politik negara negara di dunia (IPCC, n.d.; United Nations Indonesia, n.d.).

Terjadinya emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh suatu kawasan menyebabkan dampak ke negara-negara lainya. Hal ini menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan *collective action problem* yang situasi ini mendorong

terjadinya kesepakatan kerja sama internasional dan regional yang bertujuan menyelaraskan reaksi negara negara di dunia terkait dalam permasalahan iklim, baik dalam bentuk rezim lingkungan, perjanjian internasional dan kerangka kebijakan regional (Climate Change 2010).

Perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda pada setiap wilayah karena perbedaan kondisi geografis, karakteristik iklim, dan ekosistem. Di Eropa, perubahan iklim telah meningkatkan risiko berbagai kejadian ekstrem, seperti gelombang panas, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan perubahan pola curah hujan. Namun, dampak tersebut tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Uni Eropa. *European Environment Agency* menjelaskan bahwa setiap kawasan di Eropa memiliki tingkat dan karakteristik risiko perubahan iklim yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis dan iklimnya (EEA 2024).

Swedia merupakan salah satu negara anggota organisasi regional Uni Eropa dan merupakan negara yang mempelopori kebijakan terkait dengan perlindungan dari perubahan iklim di kawasan Uni Eropa. Selain sebagai negara pelopor kebijakan di kawasan regional, Swedia menjadi salah satu negara maju yang memiliki permasalahan serius dalam perubahan iklim. Swedia menjadi negara dengan kawasan yang rentan terhadap dampak dari perubahan iklim khususnya fenomena pemanasan global. Sebagai negara yang berdekatan langsung dengan kawasan artik, Swedia dilaporkan mengalami dampak pemanasan global tiga kali lebih cepat dari kawasan dunia lainya (Local Swed. 2021).

Perubahan iklim di Swedia memiliki karakteristik yang berbeda dengan beberapa negara anggota Uni Eropa. Sebagai negara yang berada di kawasan

Eropa Utara, perubahan iklim di Swedia terutama ditandai oleh peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, meningkatnya kejadian hujan ekstrem, serta perubahan kondisi musim dingin dan tutupan salju (Swedish *Meteorological and Hydrological Institute* (SMHI). Berbeda dengan Swedia, Jerman yang berada di kawasan Eropa Tengah menghadapi kombinasi risiko perubahan iklim yang lebih beragam, termasuk peningkatan suhu, gelombang panas, kekeringan pada musim panas, hujan ekstrem, dan banjir (German Environment Agency 2023). Sementara itu, Spanyol sebagai salah satu negara di kawasan Eropa Selatan menghadapi dampak perubahan iklim yang lebih dominan berupa gelombang panas, kekeringan, kelangkaan air, dan peningkatan risiko kebakaran hutan (Spanish Ministry for the Ecological 2024). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim di Uni Eropa dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik iklim masing-masing negara yang berbeda (European Environment Agency 2024).

Karakteristik perubahan iklim di Swedia tidak dapat disamakan dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Tantangan utama di Spanyol lebih berkaitan dengan peningkatan suhu ekstrim, kekeringan, dan tekanan terhadap ketersediaan air, maka perubahan iklim di Swedia lebih berkaitan dengan perubahan kondisi musim dingin, peningkatan curah hujan, serta risiko hujan ekstrem dan banjir (EEA 2024). Sementara itu, Jerman menghadapi kondisi yang berada di antara kedua karakteristik tersebut, yaitu adanya peningkatan resiko panas dan kekeringan yang terjadi bersamaan dengan ancaman hujan ekstrim dan banjir (German Environment Agency 2023). Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa negara-negara Uni Eropa menghadapi dampak perubahan

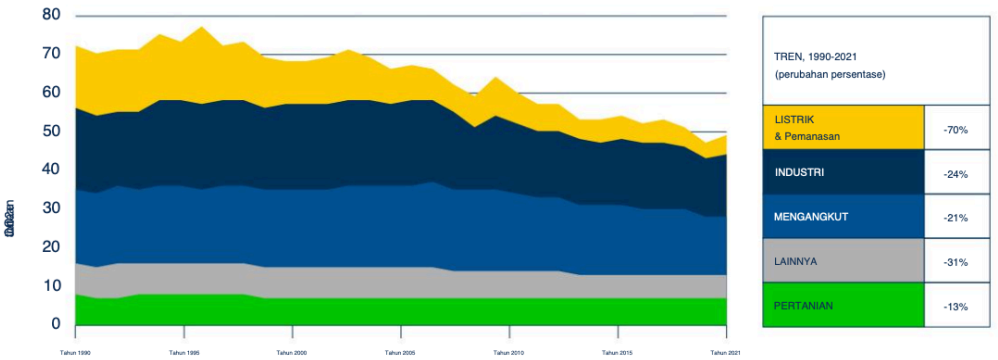
iklim yang berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan pada tingkat nasional perlu disesuaikan dengan kondisi dan risiko yang dihadapi masing-masing negara (EEA 2024).

Suhu permukaan yang lebih hangat dari suhu normal pada tahun 2018 lalu menyebabkan es mencair di beberapa wilayah Swedia. Badan Darurat Sipil Swedia atau *Sweden's Civil Contingencies Agency* melaporkan bahwa fenomena tersebut menyebabkan banjir di sejumlah wilayah seperti Gävlerbong, Svealand, dan Norrland Selatan. Meluapnya air sungai Norralaån menyebabkan wilayah sekitarnya terkhususnya wilayah Gävleborg dibanjiri oleh air sungai yang meluap dan banyak bangunan dan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir tersebut (Floods in North Jutland, n.d.).

Kemudian pada tahun 2021, emisi gas rumah kaca Swedia mencapai hampir 48 juta ton, yang 33% lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Namun, emisi meningkat sebesar 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya, 2020. Peningkatan pada tahun 2021 sebagian besar disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca covid-19 (Klimatpolitiska Rådets Rapport 2023, 21).

Grafik 1 menunjukan tren emisi Swedia sejak tahun 1990. Emisi telah menurun secara bertahap sejak awal tahun 2000-an, kecuali pada 2010 dan 2021, ketika emisi meningkat karena pemulihan ekonomi yang mengikuti krisis keuangan global (Klimatpolitiska Rådets Rapport 2023, 21).

Grafik 1. Emisi GRK Swedia



Emisi GRK Swedia menurut sektor, 1990-2021, dalam jumlah ton setara karbon dioksida (CO2e). Sektor lainnya mencakup emisi dari mesin industri, penggunaan produk, dan pengolahan limbah.

Sumber: *Swedish Policy Climate Framework*

2.2 *European Green Deal*

European Green Deal (EGD) merupakan suatu bentuk strategi utama Uni Eropa terkait dengan perubahan iklim yang bertujuan untuk menjadikan kawasan Eropa sebagai benua dengan netralitas karbon pertama di dunia pada tahun 2050 dan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030. Target tersebut dilakukan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan perubahan kebijakan pada berbagai sektor, seperti energi, transportasi, industri, pertanian, serta penggunaan lahan (European Commission 2019).

Kerangka kebijakan ini pertama kali diperkenalkan oleh komisi Eropa pada pada 11 Desember 2019 kepada lembaga lembaga Uni Eropa dan publik.

Kerangka kebijakan merupakan suatu kerangka yang disusun untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh Uni Eropa. Pengurangan emisi gas rumah kaca, transisi ke energi terbarukan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati merupakan inisiatif dari kerangka kebijakan EGD dan Uni Eropa (European Commission 2019).

Dokumen EGD terdiri dari banyak elemen yang saling terkait dan mencakup berbagai sektor seperti, bidang energi, EGD mendorong percepatan transisi menuju sumber energi terbarukan, mengurangi subsidi bahan bakar fosil dan meningkatkan efisiensi energi, bidang transportasi, EGD menargetkan elektrifikasi kendaraan dan bidang transportasi menargetkan perluasan cakupan perdagangan emisi di sektor penerbangan dan transportasi darat. Dalam sektor industri, EGD menekankan dekarbonisasi di sektor tambang seperti semen dan baja dengan dukungan inovasi teknologi, hidrogen hijau dan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Selain itu, Uni Eropa berupaya mengintegrasikan kebijakan pangan dengan keberlanjutan melalui strategi *Farm to Work* yang bertujuan untuk meningkatkan produksi organik, dan meningkatkan ketahanan pangan dengan tingkat karbon yang rendah (EEA 2023).

Selain menjadikan kawasan Eropa sebagai benua dengan netralitas karbon, tujuan dari kebijakan EGD pemisahan antara pertumbuhan ekonomi dan penggunaan sumber daya alam. EGD merupakan kerangka kebijakan yang turunannya menjadi sebuah peraturan atau regulasi yang wajib diikuti oleh negara Uni Eropa terkait ambisi dan tujuan di berbagai sektor kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek lingkungan, melainkan menghubungkan isu isu tersebut dengan keamanan dan stabilitas sosial-ekonomi di kawasan Eropa (Fetting 2020).

Dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan EGD, prosedur pengambilan keputusan Uni Eropa. Komisi Eropa memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan kebijakan atau proposal legislasi. Proposal tersebut kemudian dibahas oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Dalam prosedur legislatif biasa, kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan sebagai pembentuk legislasi bersama. Setelah proposal disepakati, kebijakan tersebut ditetapkan sebagai instrumen hukum Uni Eropa dan harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota sesuai dengan jenis instrumennya.

Regulasi Uni Eropa berlaku secara langsung di seluruh negara anggota tanpa harus diubah terlebih dahulu ke dalam hukum nasional. Uni Eropa menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh negara anggota, tetapi memberikan kewenangan kepada masing-masing negara untuk menentukan cara pelaksanaannya melalui kebijakan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan EGD tidak hanya berlangsung pada tingkat institusi Uni Eropa, tetapi juga melalui proses penyesuaian kebijakan di tingkat nasional. Negara anggota turut berperan dalam proses tersebut melalui keterlibatan pemerintah nasional dalam Dewan Uni Eropa, pembahasan teknis, serta proses negosiasi sebelum suatu kebijakan disepakati (European Climate Law 2021).

2.3 Posisi Swedia di *European Green Deal*

Swedia memiliki posisi sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan EGD. Swedia menjadi anggota Uni Eropa sejak 1 Januari 1995. Dengan status tersebut, Swedia tidak memiliki keanggotaan terpisah dalam EGD, tetapi menjadi bagian dari EGD

melalui keanggotaannya di Uni Eropa. Pemerintah Swedia berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan Uni Eropa, terutama melalui Dewan Uni Eropa.

Selain melalui Dewan Uni Eropa, Swedia juga terlibat dalam proses kebijakan Uni Eropa melalui *Permanent Representation of Sweden to the European Union* di Brussel. Perwakilan tersebut berfungsi mengoordinasikan posisi Swedia dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam proses perumusan kebijakan Uni Eropa. Setelah kebijakan ditetapkan, Swedia berkewajiban melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan bentuk hukum yang digunakan. Oleh karena itu, posisi Swedia dalam EGD dapat dilihat melalui dua peran utama. Pertama, Swedia berperan sebagai negara yang ikut membentuk kebijakan Uni Eropa. Kedua, Swedia berperan sebagai negara yang melaksanakan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan dalam kerangka EGD (EEA 2023).

Posisi Swedia juga dipengaruhi oleh kebijakan iklim nasionalnya. Sebelumnya Swedia telah menetapkan tujuan untuk mencapai emisi gas rumah kaca bersih nol pada tahun 2045, lima tahun lebih cepat dibandingkan target netralitas iklim Uni Eropa pada tahun 2050. Target tersebut menunjukkan bahwa Swedia memiliki kebijakan nasional yang relatif lebih ambisius dibandingkan dengan target umum Uni Eropa. Kebijakan nasional Swedia tetap dilaksanakan dalam hubungan dengan kebijakan Uni Eropa, termasuk EGD. Dalam hal ini, kebijakan iklim Swedia tidak terpisah dari EGD, tetapi berjalan melalui hubungan antara kebijakan nasional dan kebijakan supranasional Uni Eropa yang telah ditetapkan (Regeringskansliet, 2021;Fetting 2020).

Uni Eropa menggunakan EGD sebagai dasar bagi reformasi komprehensif di bidang iklim, energi, keanekaragaman hayati, efisiensi sumberdaya dan ekonomi sirkular. EGD telah menghasilkan revisi pada hampir semua bagian kebijakan iklim Eropa. Uni Eropa telah mengadopsi undang-undang Iklim Eropa untuk menghilangkan emisi gas rumah kaca bersih pada tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca bersih sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990. Selain itu, Uni Eropa telah mengadopsi paket legislatif komprehensif untuk mencapai tujuan iklim dalam jangka pendek yang dikenal sebagai paket *Fit for 55*. Paket Fit for 55 adalah paket legislatif Uni Eropa yang paling komprehensif yang menetapkan persyaratan yang lebih ketat pada kebijakan iklim negara anggota dan memperluas instrumen kebijakan di seluruh Uni Eropa (Klimatpolitiska Rådets Rapport 2024, 26-27; Consilium, n.d).

EGD meliputi seluruh negara anggota Uni Eropa. Saat ini, Uni Eropa terdiri atas 27 negara, yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. Selain menjadi negara Uni Eropa negara-negara tersebut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan Uni Eropa melalui lembaga dan mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, seluruh negara anggota juga berkewajiban melaksanakan instrumen kebijakan yang telah ditetapkan Uni Eropa berkaitan dengan EGD (What Is the European Green Deal? n.d).

Swedia merupakan bagian dari EGD melalui statusnya sebagai negara anggota Uni Eropa. Swedia tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan

yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa, tetapi juga memiliki kesempatan untuk ikut secara langsung dalam pembentukan kebijakan melalui dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa. Dalam tahap pelaksanaanya, Swedia melakukan penyesuain regulasi kebijakan nasionalnya dengan ketentuan Uni Eropa dan mempertahankan target iklim nasional yang lebih ambisius. Posisi ini, menjadikan Swedia sebagai salah satu negara anggota yang penting untuk dikaji dalam pelaksanaan EGD karena adanya hubungan antara kebijakan iklim nasional Swedia dan target Iklim Uni Eropa (Swedish Climate Policy Council n.d.).

2.4 Kebijakan Lingkungan Swedia Sebelum Kesepakatan *European Green Deal*

Swedia terlebih dahulu mengimplementasikan beberapa kebijakan yang berfokus pada perlindungan lingkungan sebelum adanya kesepakatan EGD. Kebijakan-kebijakan ini menunjukan komitmen Swedia dalam menetapkan isu lingkungan sebagai bagian dari agenda kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan di Swedia antara lain:

1. Pajak Karbon

Pajak karbon pertama kali diberlakukan di Swedia pada tahun 1991 yang mengenakan pajak karbon atas penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, minyak diesel dan batu bara untuk kendaraan dan minyak pemanas *(heating Oil)*. Dalam penerapanya, Swedia mengenakan tarif tunggal di mana setiap subjek dan objek yang menghasilkan emisi karbon dikenakan tarif yang seragam. Secara historis pajak karbon hanya berfokus pada bahan bakar fosil, sehingga bahan

bakar yang berasal dari tumbuhan dan limbah sebagian besar tidak dikenakan pajak (Regeringskansliet 2018).

Namun, pada Juli 2018, skema peraturan untuk pencampuran wajib bahan bakar nabati ke dalam bensin dan solar diperkenalkan. Sejak saat itu, bahan bakar nabati yang digunakan untuk pencampuran dikenakan dengan tarif yang sama seperti bahan bakar fosil. Sejak penerapan pajak karbon pada tahun 1991 hingga 2018, Swedia telah berhasil menekan emisi karbon sebesar 27% dengan penurunan yang sangat penting terjadi sejak tahun 2000 hingga 2018. Dalam penerapan pajak karbon, Swedia mengkombinasikan dengan pungutan atas karbon lainya, seperti perdagangan emisi karbon, pajak energi *(energy tax)*, pajak kendaraan *(vehicle tax)* dan pajak perdagangan *(aviation tax)*. Pajak karbon dalam penerapan di Swedia telah berhasil disesuaikan dari waktu ke waktu untuk mengakomodasikan perubahan dalam lanskap kebijakan iklim di Swedia secara keseluruhan, pajak karbon merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah Swedia untuk mengurangi emisi karbonya, strategi ini telah terbukti dalam mengurangi emisi karbon di Swedia (Metcalf and Stock 2020).

2. *Environmental Code 1998:808 (Miljöbalk 1998:808)*

Swedia mempunyai kerangka hukum lingkungan yang komprehensif sejak tahun 1998 melalui *Environmental Code 1998:808* atau dalam bahasa Swedia disebut *Miljöbalk 1998:808. Environmental Code* menjadi salah satu undang-undang lingkungan yang paling awal yang menggabungkan 15 undang-undang lingkungan yang sebelumnya ada namun belum terkoordinasi menjadi satu dokumen hukum yang sistematis dan komprehensif. *Environmental Code* terdiri dari 33 *chapters* yang dibagi menjadi 7 bagian utama dan mencakup

sekitar 500 pasal yang mengatur seluruh aspek perlindungan lingkungan hidup, kepentingan sosial, ekonomi dan ekologi dalam kebijakan nasional Swedia. Tujuan utama *Environmental Code* mendorong pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* untuk menjamin lingkungan yang sehat dan kuat bagi generasi sekarang dan masa depan di Swedia (Naturvårdsverket 2025; Regeringskansliet 2021).

Undang-undang ini menjadi landasan etika lingkungan yang menetapkan prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip pencegahan *(precautionary principle),*prinsip pencemar membayar *(polluter pays principle)* dan prinsip pilihan produk *(product choice principle),* yang menegaskan bahwa setiap pelaku yang terlibat dalam aktivitas yang berpotensi akan berdampak negatif pada lingkungan harus menilai dan mencegah dampak negatif tersebut sejak awal. Jauh sebelum EGD diumumkan oleh Uni Eropa pada tahun 2019, prinsip prinsip ini membangun kerangka kerja yang kuat untuk dekarbonisasi dan perlindungan lingkungan di Swedia.

Selain itu, *Environmental Code* mewajibkan penilaian dampak lingkungan atau *Environmental Impact Assessment (EIA)* sebagai bagian dari proses perizinan untuk aktivitas besar yang dianggap berbahaya bagi dampak lingkungan harus melalui analisis alternatif, identifikasi dampak dan rencana mitigasi sebagai syarat perizinan, hal ini merupakan bentuk dari mekanisme pengendalian pencegahan yang efektif. Selain itu di dalam *Environmental Code* mengatur mengenai pengawasan dan penegakan hukum melalui sanksi administratif, sanksi pidana dan mekanisme kompensasi atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini, menunjukan bahwa Swedia menempatkan perlindungan lingkungan sebagai

prinsip normatif dan kewajiban hukum yang dapat ditegakan (Naturvardsverket 2025; Riksdagen, n.d).

3. *Swedish Climate Policy Framework*

Pada tahun 2017, *Swedish Climate Policy Framework* atau kerangka kebijakan iklim Swedia merupakan pembaruan kebijakan iklim yang disahkan oleh parlemen Swedia untuk memastikan bahwa tindakan iklim yang dijalankan secara konsisten, berbasis hukum dan antar pemerintahan. Kerangka kebijakan iklim ini sering dianggap sebagai salah satu reformasi iklim paling penting dalam sejarah Swedia sebelum adanya kesepakatan EGD pada tahun 2019. Dalam kerangka ini tidak hanya menetapkan target emisi jangka panjang, tetapi dalam implementasinya juga membangun mekanisme institusional yang mewajibkan pemerintah untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi kebijakan iklim secara berkala (Regeringskansliet 2021; Regerings Beskrivelse 2023/24:59).

Kerangka kebijakan iklim Swedia terdiri dari tiga komponen utama yaitu, *climate act*, target iklim nasional dan *climate policy council*. Pertama, *climate act* mewajibkan pemerintahan Swedia untuk membuat kebijakan iklim berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh parlemen, memasukan laporan tahunan tentang iklim ke dalam RUU Anggaran dan menyusun rencana aksi kebijakan iklim setiap empat tahun. Dalam konteks *climate act*, hukum menjadi mekanisme akuntabilitas yang memastikan bahwa tujuan iklim terintegrasi dalam pertimbangan fiskal dan pemerintahan. Selain itu pemerintah Swedia diharuskan memastikan bahwa kebijakan iklim dan target anggaran selaras satu sama lain, sehingga isu iklim dan lingkungan menjadi bagian dari tata kelola negara dan bukan agenda sektoral yang terpisah (Law and Climate Change, n.d; Regeringskansliet 2021).

Kedua, target iklim jangka panjang, pemerintah Swedia menetapkan tujuan emisi gas rumah kaca *zero* pada tahun 2045, yang berarti emisi domestik harus berkurang sekitar 85% dibandingkan tingkat emisi pada tahun 1990. Emisi yang tersisa dapat dikurangi melalui penyerapan karbon, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon maupun dengan cara pengurangan emisi di luar wilayah Swedia. Selain target jangka panjang, target iklim ini juga menetapkan target pengurangan emisi transportasi domestik sebesar 70% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2010 dan juga menetapkan target pengurangan emisi untuk sektor yang termasuk dalam skema pembagian beban Uni Eropa. Target-target tersebut menunjukan bahwa kebijakan iklim swedia dirancang untuk mencapai sasaran yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala (Regeringskansliet 2021).

Ketiga, *climate policy council* merupakan badan ahli independen yang dibentuk dan ditugaskan untuk menilai apakah kebijakan pemerintah sudah selaras dengan tujuan iklim nasional. Badan ini tidak melakukan tugas eksekutif, namun dalam tugasnya menilai apakah kebijakan di berbagai sektor mendukung atau menghambat pencapain target iklim, menekankan dampak kebijakan yang telah diputuskan dan menentukan area yang membutuhkan tindakan tambahan. Keberadaan lembaga independen ini penting karena memperkuat transparansi pemerintah Swedia dalam mengawal kebijakan iklim Swedia (Law and Climate Change, n.d; Regeringskansliet 2021).

BAB 3

KEPATUHAN SWEDIA TERHADAP KERANGKA KEBIJAKAN *EUROPEAN GREEN DEAL* DALAM MITIGASI EMISI GAS RUMAH KACA SWEDIA TAHUN 2019-2025

Bab ketiga, penulis akan menganalisis terkait kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan EGD dalam kebijakan mitigasi emisi gas rumah kaca Swedia tahun 2019-2025, analisis akan dilakukan menggunakan teori kepatuhan dari Ronald B Mitchell.

Dalam teorinya, Ronald B Mitchell membagi empat indikator yang mewakili penerapan teori kepatuhan, yaitu: (1) *Treaty-Induced Compliance,* (2) *Coincidental Compliance,* (3) *Good Faith Non-Compliance* dan (4) *Intentional Non-Compliance)* (Mitchell 2007, 895). Dalam melihat dampak dari perjanjian internasional, pengaruh yang ditimbulkan dapat dianalisis melalui beberapa indikator. Indikator-indikator ini berperan dalam mengevaluasi negara bertindak dengan ketentuan dalam kesepakatan atau justru sebaliknya menunjukan perilaku berlawanan. Perilaku kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian merupakan fokus analisis yang ditulis oleh Ronald Mitchell. Ketiga indikator yang sudah disebut di atas yaitu, *Outputs, Outcomes dan Impact*.

3.1 *Outputs*

Outputs merupakan instrumen kebijakan dan regulasi yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem hukum domestik suatu negara untuk mendukung pelaksanaan perjanjian internasional (Mitchell 2007, 896). Analisis terhadap *output* bisa dilihat dari kondisi kebijakan iklim Swedia sebelum EGD diperkenalkan pada tahun 2019. Hal ini penting karena Swedia telah memiliki dasar kebijakan iklim yang cukup kuat sebelum adanya EGD. Pada tahun 2017, Swedia membentuk *Climate Policy Framework* yang menetapkan arah kebijakan jangka panjang dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Kerangka tersebut mencakup target pencapaian emisi bersih nol pada tahun 2045. Kemudian, kerangka kebijakan tersebut diperkuat melalui *Climate Act* pada tahun 2018. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah untuk mempertimbangkan aspek iklim dalam penyusunan kebijakan, menyampaikan laporan iklim kepada parlemen, serta menyusun rencana aksi iklim secara berkala yang termuat dalam pasal 2 hingga 5 *Climate Act* (Law and Climate Change n.d).

Setelah EGD diperkenalkan, kebijakan iklim Uni Eropa mengalami penguatan melalui berbagai instrumen yang diarahkan untuk mencapai target pengurangan emisi yang lebih ambisius. Salah satu bentuk penguatan tersebut diwujudkan melalui paket kebijakan *Fit for 55*. Paket ini mencakup penyesuaian terhadap sejumlah instrumen utama Uni Eropa, antara lain *Effort Sharing Regulation* (ESR), *European Union Emissions Trading System* (EU ETS), serta kebijakan *Land Use, Land Use Change and Forestry* (LULUCF). Melalui paket tersebut, Uni Eropa menetapkan arah pengurangan emisi bersih sekurang-kurangnya 55 persen pada tahun 2030 dibandingkan tingkat emisi tahun

1990. Perubahan tersebut menyebabkan tuntutan terhadap negara-negara anggota Uni Eropa dalam mencapai target mitigasi emisi dan menjadi bagian dari kerangka kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan nasional (Consilium, n.d.; European Commission 2020).

Dalam konteks Swedia, salah satu bentuk penyesuaian yang penting terlihat pada perubahan target dalam kerangka *Effort Sharing Regulation*. ESR mengatur pengurangan emisi dari sektor-sektor yang tidak termasuk dalam EU ETS, seperti transportasi jalan, bangunan, pertanian, dan pengelolaan limbah (European Commission 2021). Setelah adanya penguatan kebijakan iklim Uni Eropa melalui paket *Fit for 55*, target pengurangan emisi Swedia dalam kerangka ESR untuk tahun 2030 ditetapkan sebesar 50 persen dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 200. Peningkatan target tersebut menunjukkan bahwa Swedia menghadapi kewajiban pengurangan emisi yang lebih besar setelah EGD dan paket *Fit for 55* diberlakukan .

Perubahan target ESR menjadi bagian penting dalam analisis output karena menunjukkan adanya perubahan terhadap kerangka kewajiban yang harus dipenuhi oleh Swedia. Meskipun demikian, peningkatan target tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya perubahan perilaku pemerintah atau keberhasilan dalam menurunkan emisi. Pada tahap output, perhatian utama diarahkan pada keberadaan target, regulasi, dan instrumen kebijakan yang dihasilkan atau diperkuat sebagai bagian dari pelaksanaan komitmen mitigasi. Sementara itu, tindakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai target tersebut termasuk dalam indikator outcome (Mitchell, 2007).

Kemudian penguatan kebijakan iklim Uni Eropa setelah EGD juga terlihat melalui penyesuaian terhadap EU ETS. Sistem perdagangan emisi tersebut diperketat untuk meningkatkan pengurangan emisi pada sektor-sektor yang berada dalam cakupannya. Reformasi EU ETS melalui paket *Fit for 55* mencakup penguatan batas emisi, perluasan cakupan kebijakan, serta peningkatan mekanisme pengurangan emisi secara bertahap (European Commission 2021). Pengetatan EU ETS memberikan tekanan yang lebih besar kepada sektor industri dan kegiatan ekonomi untuk melakukan penyesuaian menuju proses produksi yang menghasilkan emisi lebih rendah. Sebagai negara anggota Uni Eropa, Swedia harus melaksanakan ketentuan tersebut dalam kebijakan mitigasi nasional, khususnya pada sektor-sektor yang termasuk dalam cakupan EU ETS (Effort Sharing 2021-2030, n.d).

Selain ESR dan EU ETS, penyesuaian juga dilakukan melalui kebijakan LULUCF. Kebijakan ini berkaitan dengan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan. LULUCF memiliki peran penting dalam kebijakan iklim karena mencakup dua aspek, yaitu sumber emisi dan kemampuan ekosistem dalam menyerap karbon. Melalui penguatan regulasi LULUCF, Uni Eropa menetapkan target peningkatan penyerapan karbon bersih pada sektor penggunaan lahan dan kehutanan hingga tahun 2030 (European Commission 2021; European Parliament and Council of the European Union 2023). Penguatan target tersebut menempatkan penyerapan karbon sebagai salah satu unsur penting dalam pencapaian target iklim Uni Eropa. Bagi Swedia, yang memiliki kawasan hutan yang luas, kebijakan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan mitigasi nasional.

Dalam teorinya, Mitchell menyatakan bahwa outputs dari suatu perjanjian internasional dapat digunakan sebagai indikator karena adanya pengaruh yang ditimbulkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan yang ditetapkan menunjukan bagaimana perilaku suatu negara berubah sebagai akibat dari perjanjian tersebut, meskipun peraturan semata-mata tidak cukup untuk menjamin perubahan tersebut (Mitchell 2007, 896).

Swedia sebagai anggota Uni Eropa berkewajiban mengimplementasikan regulasi yang dihasilkan dari kerangka kesepakatan EGD. *Outputs* kepatuhan Swedia terhadap EGD bisa dilihat dalam penyesuaian dan penyusunan regulasi hukum nasional Swedia *Climate Act*. *Climate Act* Swedia sudah berlaku sejak 2018, setelah adanya kesepakatan EGD pada tahun 2019 pemerintah Swedia melakukan penyesuain arah implementasi *Climate Act* agar selaras dengan target dekarbonisasi Uni Eropa. Dalam dokumen tersebut, pemerintah Swedia menyatakan bahwa kebijakan iklim nasional harus diaplikasikan ke semua sektor pembangunan dan secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap EGD sebagai arah kebijakan baru iklim Uni Eropa. Pemerintah menyebutkan bahwa Swedia akan mendorong meningkatkan komitmen kebijakan iklim Uni Eropa agar sesuai dengan tujuan perjanjian Paris, termasuk dalam membantu peningkatan target pengurangan emisi menjadi 55% pada tahun 2030. Pemerintah Swedia menunjukan bahwa setelah EGD diperkenalkan oleh Komisi Uni Eropa, pemerintah Swedia tidak hanya mempertahankan target nasional yang sudah ada sebelumnya, tetapi menyelaraskan cara mereka menerapkan kebijakan dengan agenda iklim yang telah ditetapkan Uni Eropa (Naturvardsverket 2025, Climate Act 2017).

Kemudian *Climate Act* mewajibkan pemerintah menyampaikan laporan iklim setiap tahun kepada parlemen dan menyusun *Climate Policy Action Plan* setelah setiap pemilihan umum berlangsung. Setelah EGD diperkenalkan, mekanisme ini sebagai alat yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan nasional Swedia sudah selaras dengan kebijakan iklim Uni Eropa. Selain itu, Swedia memiliki Dewan Kebijakan Iklim yang berperan sebagai lembaga independen yang memberi evaluasi terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan target iklim nasional dan target yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Dengan adanya, kapasitas kelembagaan yang mendukung pelaksanaan komitmen Swedia terhadap EGD ditunjukan dengan penguatan mekanisme pelaporan, evaluasi dan koordinasi (Naturvardsverket 2025).

Dalam kerangka kebijakannya, EGD memiliki *Fit for 55* yang terdiri dari regulasi *Effort Sharing Regulation* (ESR), *Union Emissions Trading System* (EU ETS) dan *Land Use, Land Use Change and Forestry* (LULUCF) yang mana kebijakan ini wajib dipatuhi oleh negara anggota Uni Eropa (Regeringskansliet 2023, 26).

Pemerintah Swedia melakukan penyesuaian terhadap EU ETS, ESR dan LULUCF. Ketiga instrumen tersebut merupakan turunan langsung dari EGD yang dirancang untuk pencapain target turunan emisi gas rumah kaca Uni Eropa sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan pada tahun 1990. Untuk menyelaraskan regulasi tersebut, pemerintah Swedia melakukan penyesuain terhadap EU ETS dan ESR yang lebih diperketat untuk tahun 2030. Pengurangan tersebut didistribusikan melalui pengurangan batas emisi dalam EU ETS sebesar 62% dan pengurangan ruang emisi dalam ESR 40% pada tahun 2030. Dalam peraturan

ESR yang direvisi, Swedia berkomitmen bahwa emisi nasional di sektor ESR akan dikurangi sebesar 50% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2005 yang terjadinya peningkatan sebesar sepuluh poin persentase dibandingkan peraturan sebelumnya. Sektor ESR mencakup, transportasi jalan raya, mesin, pemanas ruangan dan pertanian (Regeringskansliet 2023, 39-40).

Dengan adanya beberapa penyesuain yang dilakukan oleh pemerintah Swedia, maka dapat menjadi landasan yang digunakan penulis untuk menentukan indikator Outputs. Oleh karena itu, *outputs* dari *treaty induced compliance* dari teori kepatuhan oleh Mitchell membuktikan bahwa pemerintah Swedia mematuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan Uni Eropa.

Tabel 2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah EGD

Aspek	**Sebelum EGD**	**Setelah EGD dan *Fit For 55***
Kerangka Kebijakan Iklim Nasional	Swedia lebih dahulu memiliki *Climate Policy Framework* sejak 2018 yang menetapkan target emisi bersih nol pada tahun 2045	Kerangka kebijakan nasional tersebut tetap menjadi dasar dalam merespon penguatan kebijakan Iklim Uni Eropa.
Climate Act	Climate Act telah ada sejak 2018 dan mewajibkan pemerintah mempertimbangkan aspek iklim dalam penyusunan kebijakan serta menyusun laporan dan rencana aksi iklim	Climate Act berfungsi sebagai dasar kelembagaan bagi Swedia dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan perkembangan kebijakan Uni Eropa
Effort Sharing Regulation (ESR)	Swedia telah memiliki kewajiban pengurangan emisi pada sektor di luar EU ETS melalui kerangka ESR	Target pengurangan emisi Swedia untuk tahun 2030 ditetapkan sebesar 50% dibandingkan tingkat emisi tahun 2005

European Union Emissions Trading System (EU ETS)	Sektor industri dan kegiatan ekonomi tertentu telah berada dalam sistem perdagangan emisi Uni Eropa	EU ETS diperkuat melalui pengetatan batas emisi dan peningkatan tuntutan pengurangan emisi pada sektor yang tercakup.
Land Use Change and Forestry (LULUCF)	Penggunaan lahan dan kehutanan telah menjadi bagian dari kebijakan iklim Uni Eropa dan kebijakan nasional Swedia	Target penyerapan karbon dan peran sektor kehutanan diperkuat dalam pencapain target iklim Uni Eropa

Sumber: Diolah oleh peneliti (Effort Sharing 2021-2030,n.d.; Consilium, n.d.; Naturvardsverket 2025).

Output dalam hubungan Swedia dengan kerangka kebijakan EGD dapat dilihat melalui penguatan regulasi, peningkatan target mitigasi, serta penyesuaian terhadap instrumen kebijakan Uni Eropa setelah tahun 2019. Namun, keberadaan perubahan tersebut belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan pelaksanaan EGD dalam kebijakan domestik Swedia. Penilaian lebih lanjut memerlukan analisis terhadap tindakan pemerintah dan aktor domestik dalam menerapkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan berfokus pada indikator outcome untuk melihat apakah perubahan dalam kerangka kebijakan telah diikuti oleh perubahan perilaku dan tindakan dalam pelaksanaan mitigasi emisi gas rumah kaca.

3.2 *Outcome*

Outcome merupakan perubahan cara pemerintah atau aktor sub negara berperilaku. Dalam bukunya Mitchell menulis "*Behavior change is useful as an*

indicator since iea as almost always identify behavioral changes that must occur to achieve agreement goals" (Mitchell 2007, 896). Mitchell berpendapat, perubahan cara pemerintahan atau aktor sub negara berperilaku bisa membantu dalam menganalisis kepatuhan negara karena dalam upaya negara untuk mencapai perjanjian internasional pasti terdapat perubahan perilaku yang terlihat. Namun Mitchel juga melihat bahwa ada kekurangan dalam menganalisis kepatuhan melalui *outcome.* Kekurangan yang dimaksud yakni bahwa tindakan pemerintah atau aktor sub negara sulit untuk diamati karena beberapa tindakan tidak transparan dan beberapa tindakan dilakukan bukan juga karena adanya perjanjian internasional dan terkadang sulit untuk melihat apakah perilaku tersebut benar-benar dipengaruhi oleh perjanjian internasional (Mitchell 2007, 896).

Perubahan perilaku Swedia bisa dilihat pada sektor industri baja. Sektor ini menjadi penyumbang emisi yang tinggi sehingga dengan adanya perubahan teknologi produksi menjadi penting dalam mitigasi emisi gas rumah kaca. Proyek *Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology* (HYBRIT) telah dikebangkan melalui kerja sama antara SSAB, LKAB dan Vattenfall untuk menghasilkan besi dan baja tanpa menggunakan bahan bakar fosil. Namun proyek HYBRIT tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai akibat dari EGD. Pada tahun 2020, fasilitas percontohan hybrit untuk proses reduksi langsung berbasis hidrogen bebas fosil mulai beroperasi. Kemudian pada tahun 2021 SSAB memproduksi dan mengirimkan baja bebas fosil kepada pelanggan (Hybrit n.d). Hal ini, menunjukan bahwa perkembangan teknologi rendah karbon telah diterapkan dalam proses produksi. Dalam konteks *outcome* perkembangan HYBRIT menggambarkan adanya perubahan perilaku aktor industri melalui upaya mengurangi

ketergantungan terhadap batu bara dan bahan bakar fosil dalam produksi besi dan baja.

Selain proyek HYBRIT Swedia juga melakukan perubahan pada sektor industri melalui proyek Stegra, yang sebelumnya dikenal sebagai H2 *Green Steel*. Pada tahun 2024, *Swedish Energy Agency* memberikan bantuan negara sebesar SEK 1,2 miliar untuk mendukung pembangunan fasilitas produksi baja rendah karbon. Proyek tersebut dirancang untuk menggunakan hidrogen bebas fosil sebagai pengganti batu bara kokas dalam proses produksi besi (Stegra n.d.). Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola investasi dan teknologi industri, yaitu dari metode produksi konvensional menuju metode produksi yang dirancang untuk menghasilkan emisi yang lebih rendah.

Perkembangan HYBRIT dan Stegra menunjukkan bahwa perubahan perilaku dalam sektor industri tidak hanya berlangsung melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui keputusan investasi, pengembangan teknologi, dan perubahan proses produksi. Pemerintah mendorong perubahan tersebut melalui dukungan pembiayaan, sementara perusahaan meresponsnya dengan mengembangkan teknologi produksi rendah karbon. Kedua proyek tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *outcome* karena menunjukkan tindakan konkret aktor domestik dalam menyesuaikan kegiatan industri dengan arah kebijakan mitigasi emisi Uni Eropa.

Selain itu, untuk mengkoordinasikan dan memperkuat kapasitas transformasi sosial di Swedia bagian utara, pemerintah menyediakan 20 juta SEK kepada Badan Swedia untuk ekonomi dan regional. Pertumbuhan ekonomi masing-masing 2,5 juta SEK diberikan kepada pemerintah daerah dan

administratif di Norrbotten dan Västerbotten. Pada saat yang sama, dukungan untuk proyek-proyek lingkungan binaan yang inovatif dan berkelanjutan di daerah Norrbotten dan Västerbotten sebesar 40 juta SEK dalam rentan tahun 2024-2030 sedang disalurkan secara bertahap oleh pemerintah Swedia. Untuk membiayai reformasi lainya, industri didukung dengan tambahan dana sebesar 100 juta SEK pada tahun 2024 dengan fokus pada baja bebas fosil. Dengan demikian dana yang dianggarkan untuk industri pada tahun 2024 berjumlah 1,46 miliar SEK. Pemerintah mengusulkan agar program jaminan kredit untuk investasi industri hijau berskala besar diperpanjang yang diusulkan berjumlah 80 miliar SEK pada tahun 2024 (Klimatpolitiska Rådets Rapport 2024, 40-41).

Perubahan *outcome* dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi Swedia tidak berlangsung secara lurus. Terjadinya perubahan pemerintahan pada tahun 2022 mempengaruhi arah pelaksanaan kebijakan iklim, terutama pada sektor transportasi. Salah satu perubahan yang terjadi adalah penurunan *reduction obligation*, yaitu kewajiban pengurangan emisi melalui penggunaan bahan bakar terbarukan dalam sektor transportasi. Sebelum perubahan tersebut, tingkat *reduction obligation* untuk bahan bakar diesel mencapai 30,5 persen, sedangkan untuk bensin sebesar 7,8 persen. Mulai tahun 2024, pemerintah menurunkan tingkat kewajiban tersebut menjadi 6 persen untuk bensin dan diesel. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan tindakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan mitigasi. Jika sebelumnya pemerintah menggunakan kewajiban penggunaan bahan bakar terbarukan sebagai instrumen untuk mengurangi emisi transportasi, kebijakan setelah tahun 2022 menunjukkan adanya pelonggaran

aturan terhadap instrumen tersebut (Regeringskansliet 2023, 39-40). (Klimatpolitiska Rådets Rapport 2024, 23-24).

Ketika pemerintah Swedia mengurangi kewajiban pencampuran biofuel (*reduction obligation)* dan menurunkan pajak bahan bakar fosil, Dewan menilai bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan emisi domestik Swedia. Dalam hal ini, Dewan memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko membuat Swedia akan gagal memenuhi komitmen yang mengikat kepada Uni Eropa pada tahun 2030 yang berpotensi menimbulkan sanksi keuangan atau mengharuskan Swedia membeli kredit emisi dari negara anggota Uni Eropa lain (Klimatpolitiska Rådets Rapport 2024, 36).

Perubahan perilaku pemerintah Swedia, menunjukan bahwa implementasi EGD tidak hanya dilakukan pada pembentukan regulasi, melainkan adanya perubahan dalam pelaksanaan kebijakan nasional Swedia. Dengan demikian, perubahan perilaku pemerintah Swedia dalam menyesuaikan komitmen Swedia terhadap Uni Eropa di setiap laporan Dewan Kebijakan Iklim Swedia merupakan bentuk *outcome* yang menunjukan adanya kepatuhan Swedia terhadap Uni Eropa dalam EGD. Hal ini, sesuai dengan apa yang telah Mitchell tulis, bahwa *outcomes* dapat diidentifikasi melalui perubahan perilaku pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan suatu perjanjian internasional (Mitchell 2007, 895 n.d.).

3.3 *Impacts*

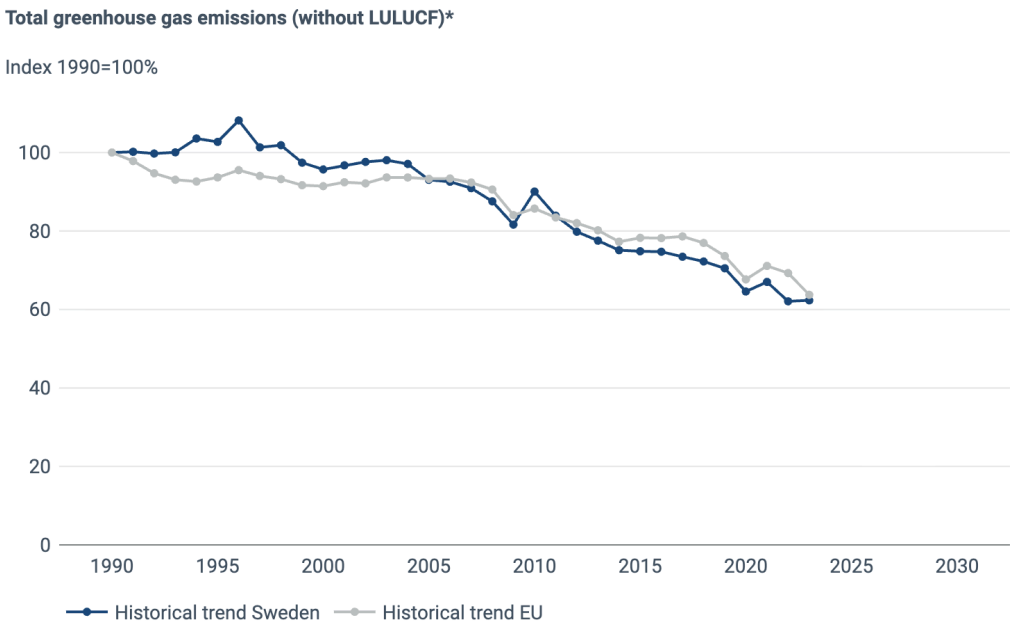
Impacts adalah indikator terakhir untuk menentukan kategori kepatuhan dari teori Mitchell. *Impacts* merupakan dampak langsung dari kualitas lingkungan yang dapat dirasakan atau terlihat (Mitchell 2007, 896). Kelebihan menggunakan

perubahan lingkungan untuk menganalisis menurut Mitchell adalah adanya perubahan lingkungan bisa menjadi bukti dari bentuk perilaku kepatuhan dan bukti dari adanya pengaruh rezim lingkungan, karena pada dasarnya perubahan lingkungan tidak hanya terbatas oleh batas negara. Namun kekurangan menggunakan perubahan lingkungan untuk menganalisis menurut Mitchell adalah banyak faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan, tidak hanya dari aktivitas manusia. Sehingga sulit untuk mengetahui apakah perubahan lingkungan yang terjadi merupakan pengaruh dari negara. Perubahan lingkungan yang terjadi, baik itu perubahan yang positif maupun negatif bisa saja terjadi karena faktor lain dan bukan karena ketidakpatuhan negara terhadap rezim lingkungan (Mitchell 2007, 896-897).

Mengutip data dari *European Environment Agency* (EEA), pada tahun 2023, total emisi gas rumah kaca tidak termasuk penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) di Swedia mencapai 44,4 Mt setara karbon dioksida. Emisi menunjukan tren penurunan, meskipun terdapat beebrappa fluktuasi tahunan di beberapa sektor yang mempengaruhi total emisi. Total emisi menurun sebesar 38% antara tahun 1990 dan 2023 (EEA 2025). Penurunan ini disumbangkan dari sektor perumahan dan komersial, yang dihasilkan dari penggatian pembakaran bahan bakar fosil untuk pemanasan dengan penggunaan pemanasan distrik dan listrik, termasuk pompa panas. Emisi di industri manufaktur dan konstruksi telah menurun karena pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, sebagai akibat dari peralihan ke biofuel dan listrik. Selain itu, produksi listrik dan panas semakin berbasis pada energi terbarukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, emisi di sektor transportasi telah menurun, terutama karena penggunaan mobil yang lebih hemat energi dan peningkatan penggunaan biofuel. Total emisi pada tahun 2030 diproyeksikan berada dibawah level tahun 2023, terutama karena pengurangan emisi dari sektor industri dan transportasi.

Grafik 2. Total Emisi Gas Rumah Kaca



Sumber: *European Environment Agency*

Indikator diatas menunjukan tren total emisi gas rumah kaca, tidak termasuk emisi dari sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF), Untuk perbandingan, disertakan dua garis indeks yang pertama merujuk pada emisi spesifik negara, sedangkan yang kedua menyatakan total emisi Uni Eropa (EEA 2025 Total greenhouse gas emissions (without LULUCF 2025).

Pada tahun 2024, terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca Swedia sekitar 48,1 juta ton CO_2e atau lebih dari 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil setelah adanya pelonggaran kewajiban penggunaan bahan bakar terbarukan (Swedish Environmental Protection Agency). Data tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada tingkat kebijakan dapat memberikan dampak yang relatif cepat terhadap perkembangan emisi, khususnya pada sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil.

Tetapi pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang lebih dinamis. Berdasarkan data sementara, emisi gas rumah kaca Swedia kembali mengalami penurunan menjadi sekitar 46,7 juta ton CO_2e (Naturvårdsverket 2025). Penurunan tersebut menunjukkan bahwa perubahan emisi tidak berlangsung secara lurus, tetapi dipengaruhi oleh kombinasi antara kebijakan energi, penggunaan bahan bakar, kondisi ekonomi, dan perubahan pada sektor-sektor tertentu.

Selain sektor energi, transportasi, dan industri, kondisi mitigasi Swedia dipengaruhi oleh sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan atau LULUCF. Sektor ini memiliki peran penting karena berfungsi sebagai penyerap karbon yang dapat membantu mengurangi jumlah emisi bersih nasional Swedia. Kapasitas penyerapan karbon melalui hutan dan lahan menjadi salah satu komponen penting dalam pencapaian target iklim Swedia maupun Uni Eropa (European Commission 2021; IPCC 2022).

Namun, perubahan pada sektor LULUCF tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai dampak langsung dari EGD. Kapasitas penyerapan karbon

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekologis, aktivitas kehutanan, perubahan penggunaan lahan, kebakaran, serta kebijakan nasional di bidang kehutanan. Oleh karena itu, perkembangan sektor LULUCF lebih tepat digunakan untuk menunjukkan kompleks dalam pencapaian mitigasi Swedia. Penurunan emisi bersih tidak hanya bergantung pada pengurangan emisi dari sektor energi dan transportasi, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan kapasitas penyerapan karbon.

Secara keseluruhan, indikator *impact* menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan mitigasi Swedia selama periode 2019-2025 menghasilkan perkembangan yang bersifat dinamis dan berbeda antar sektor. Pada sektor transportasi, perubahan kebijakan bahan bakar memberikan dampak yang relatif cepat terhadap perkembangan emisi. Peningkatan emisi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pelonggaran instrumen kebijakan dapat mengurangi efektivitas mitigasi. Sementara itu, penurunan emisi pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan, tetapi belum cukup untuk membuktikan keberhasilan kebijakan secara menyeluruh.

Pada sektor industri, dampak kebijakan lebih terlihat dalam bentuk perubahan teknologi dan investasi jangka panjang. Proyek HYBRIT dan Stegra menunjukkan adanya upaya untuk mengubah struktur produksi industri menuju sistem yang lebih rendah karbon (Stegra n.d;Hybrit n.d). Tetapi, dampak nyata terhadap emisi nasional masih terbatas karena proyek tersebut belum sepenuhnya mencapai tahap operasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan mitigasi perlu dinilai tidak hanya berdasarkan hasil jangka pendek, tetapi juga berdasarkan kemampuan kebijakan dalam menciptakan perubahan struktural.

Berdasarkan penjelasan diatas, impact mitigasi yang dilakukan Swedia tidak dapat dikategorikan sebagai keberhasilan atau kegagalan. Adanya perkembangan dalam penguatan teknologi rendah karbon dan penurunan emisi pada tahun 2023 dan 2025. Tapi adanya keterbatasan dari meningkatnya emisi pada tahun 2024 belum optimalnya dampak investasi industri rendah karbon. Hal ini menunjukan bahwa pencapain mitigasi Swedia masih banyak faktor yang mempengaruhi seperti konsistensi kebijakan, kesinambungan implementasi dan kemampuan pemerintah dalam menjaga antara target dan instrumen kebijakan.

Dalam indikator impact memberikan gambaran kepatuhan Swedia terhadap kerangka EGD belum menghasilkan penurunan emisi yang stabil dalam rentan tahun 2019-2025. Namun adanya sikap nyata dari pemerintah Swedia seperti perubahan kebijakan, tindakan pemerintah dalam mitigasi emisi gas rumah kaca dan investasi teknologi menunjukan adanya proses penyesuain terhadap arah kerangka kebijakan EGD.

3.4 Kategori Kepatuhan Swedia berdasarkan *Compliance Theory*

Setelah melakukan penilain dari ketiga indikator, penulis akan menentukan dari keempat kategori yang telah ditentukan oleh Mitchell dalam menilai bentuk kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional, yaitu: *Treaty Induce Compliance, Coincidental Compliance, Good Faith non Compliance* dan *Intentional non Compliance*. Keempat kategori kepatuhan tersebut dapat ditentukan oleh indikator *outputs, outcome* dan *impact.* Berdasarkan hasil analisis dari penulis untuk menentukan kategori, Swedia termasuk ke dalam kepatuhan *treaty induce compliance,* hal ini ditentukan dari ketiga indikator yang telah

disampaikan di atas. Penulis memilih treaty induce compliance dikarenakan Swedia tidak hanya secara formal mengikuti ketentuan EGD, namun Swedia juga berperan secara aktif mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan nasionalnya dan melakukan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati antara Swedia dan Uni Eropa.

Salah satu ciri *treaty induce compliance* merujuk pada kepatuhan hukum yang disertai dengan perubahan sikap negara sebagai hasil pengaruh dari perjanjian. Dalam hal ini, Swedia menunjukan bahwa mereka mengadopsi perjanjian bersama Uni Eropa secara sadar dan menunjukan bahwa kepatuhan yang dilakukan bukan hanya dari sisi hukum, tetapi di implementasi dan hasil. Sejak Uni Eropa meluncurkan EGD pada tahun 2019, Swedia merupakan salah satu pelopor dari kebijakan tersebut. Pada tahun 2023 Swedia memegang Kepresidenan Dewan Uni Eropa *(Presidency of the Council of the EU)*, dibawah Kepresidenan Swedia, Dewan menyetujui beberapa instrumen hukum terkait dengan EGD, yakni, sistem ETS, perluasan perdagangan emisi untuk mencakup sektor-sektor baru dan pengetatan sistem perdagangan emisi Uni Eropa, Dana iklim sosial, mekanisme penyesuain batas karbon untuk mencegah kebocoran karbon, peraturan pembagian upaya/ERS, peraturan tentang dimasukkannya emisi dan penyerapan gas rumah kaca dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) dan peraturan untuk mengurangi emisi CO2 hingga nol untuk mobil penumpang dan van baru mulai tahun 2035 (Regeringskansliet 2023).

Dari indikator *outputs*, Swedia telah melakukan implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa secara kuat dan tersktur ke kebijakan iklim

nasionalnya. Swedia tidak hanya menetapkan target, tetapi juga menyediakan mekanisme pemantauan serta evaluasi melalui lembaga independen, yakni Dewan Kebijakan Iklim (Klimatppolitiska rádet), yang mana seperti sudah dijelaskan diatas, lembaga ini bertugas mengevaluasi seberapa baik kebijakan pemerintah secara keseluruhan selaras dengan tujuan iklim untuk mencapai nol emisi gas rumah bersih pada tahun 2045 dan komitmen Swedia terhadap Uni Eropa (Klimatpolitiska Rådets Rapport 2024, n.d.Klimatpolitiska Rådets Rapport 2023, n.d.).

Indikator *outcome* memperlihatkan bahwa perubahan pada tingkat kebijakan tersebut tidak berhenti pada penyesuaian formal. Pemerintah dan aktor domestik melakukan berbagai tindakan yang mendukung transformasi menuju kegiatan rendah karbon. Pada sektor industri, perkembangan HYBRIT menuju tahap penerapan teknologi dan dukungan pemerintah terhadap transformasi industri baja menunjukkan adanya perubahan dalam pola investasi dan pengembangan teknologi. Dukungan terhadap HYBRIT serta pembangunan industri baja rendah karbon oleh Stegra menunjukkan bahwa proses mitigasi diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan pemerintah dan sektor industri (Hybrit n.d).

Namun, hasil *outcome* juga menunjukkan bahwa adanya perubahan perilaku tidak berlangsung secara sama pada seluruh sektor. Setelah adanya pergantian pemerintahan pada tahun 2022 perubahan kepemimpinan di dalam negara Swedia, yang mana pemerintahan Liberal-Konservatif berkuasa setelah pemilihan umum tahun 2022 dengan dukungan dari partai Demokrat Swedia, untuk mengamankan mayoritas parlemen, pemerintah koalisi tiga partai tersebut

didukung melalui kesepakatan Tidö, yang menekankan kebijakan iklim dan energi baru yang bertujuan untuk mengurangi beban bagi masyarakat. Meskipun emisi jangka pendek diperkirakan akan meningkat sebagai akibat dari kemunduran kebijakan, pemerintah mengklaim bahwa emisi justru akan tercapai dalam jangka panjang pada tahun 2045 melalui elektrifikasi dan tenaga nuklir (Bäckstrand 2025, 288). Terjadi perubahan arah kebijakan pada sektor transportasi melalui penurunan *reduction obligation*. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mitigasi Swedia tetap dipengaruhi oleh dinamika politik domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap EGD tidak berarti seluruh kebijakan domestik selalu bergerak secara konsisten ke arah penguatan mitigasi. Dalam kerangka Treaty-Induced Compliance, keberadaan variasi tersebut tidak secara otomatis menghilangkan bentuk kepatuhan, selama terdapat bukti bahwa kerangka internasional tetap memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku dan pelaksanaan kebijakan negara.

Kemudian pada indikator *impacts*, sektor emisi menunjukan tren penurunan, meskipun terdapat beberapa fluktuasi tahunan di beberapa sektor yang mempengaruhi total emisi. Total emisi menurun sebesar 38% antara tahun 1990 dan 2023. Jika dilihat dari indikator yang telah dijabarkan, Swedia menunjukan semua karakteristik utama dari kategori *treaty induce compliance*, Swedia tidak hanya membuat regulasi yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh EGD, tetapi juga melakukan penyesuain kebijakan sektoral dan menghasilkan dampak yang nyata terhadap lingkungan dan emisi domestik Swedia. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Swedia termasuk kategori dari teori kepatuhan Mitchell, yaitu *treaty induce compliance.* Meskipun, adanya perubahan

kepemimpinan, namun Swedia tetap memegang penuh komitmennya pada Uni Eropa tentang mitigasi emisi gas rumah kaca di kawasan tersebut.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan *European Green Deal* dalam mitigasi emisi gas rumah kaca selama periode 2019-2025, dapat disimpulkan bahwa Swedia menunjukkan bentuk kepatuhan yang lebih cenderung mengarah pada *Treaty-Induced Compliance*. Kepatuhan tersebut terlihat melalui adanya hubungan antara penguatan kerangka kebijakan iklim Uni Eropa setelah diperkenalkannya *European Green Deal* dengan penyesuaian kebijakan, tindakan pemerintah dan aktor domestik, serta perkembangan upaya mitigasi emisi gas rumah kaca di Swedia. Meskipun Swedia telah memiliki fondasi kebijakan iklim yang kuat sebelum *European Green Deal* diperkenalkan, perkembangan kebijakan Uni Eropa selama periode penelitian tetap memberikan kerangka tambahan yang memperkuat arah, target, dan pelaksanaan mitigasi di tingkat nasional.

Pada indikator *output*, kepatuhan Swedia terlihat melalui keterlibatannya dalam pelaksanaan berbagai penguatan kebijakan iklim Uni Eropa yang berkembang dalam kerangka *European Green Deal*. Penguatan target pengurangan emisi melalui *Effort Sharing Regulation, European Union Emissions Trading System*, dan sektor *Land Use, Land Use Change and Forestry* menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi Swedia selama periode penelitian berada dalam kerangka kewajiban Uni Eropa. Dalam hal ini, EGD tidak menjadi titik awal kebijakan mitigasi Swedia, tetapi berperan dalam memperkuat konteks

kebijakan dan tuntutan mitigasi yang harus direspons oleh negara anggota Uni Eropa.

Pada indikator outcome, terdapat perubahan tindakan yang menunjukkan bahwa proses mitigasi tidak hanya berhenti pada tingkat kebijakan formal. Perubahan terlihat melalui dukungan pemerintah terhadap transformasi industri rendah karbon dan perkembangan teknologi produksi baja bebas fosil melalui HYBRIT serta pembangunan industri baja rendah karbon oleh Stegra. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam orientasi investasi, pengembangan teknologi, dan proses transformasi industri. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan tindakan tersebut tidak berlangsung secara seragam pada seluruh sektor. Perubahan kebijakan pada sektor transportasi, khususnya penurunan *reduction obligation* setelah pergantian pemerintahan, menunjukkan bahwa pelaksanaan mitigasi Swedia tetap dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan tidak selalu bergerak secara konsisten menuju penguatan instrumen pengurangan emisi.

Sedangkan indikator *impact*, perkembangan mitigasi emisi gas rumah kaca Swedia menunjukkan kondisi yang bersifat dinamis. Peningkatan emisi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pelemahan instrumen kebijakan pada sektor tertentu dapat memberikan dampak terhadap perkembangan emisi dalam jangka pendek. Sementara itu, penurunan kembali emisi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi mitigasi tidak berkembang secara lurus dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan energi, penggunaan bahan bakar, kondisi ekonomi, serta perkembangan sektoral. Pada sektor industri, investasi dalam teknologi rendah karbon menunjukkan adanya potensi dampak jangka panjang,

meskipun dampak aktual terhadap penurunan emisi nasional belum sepenuhnya dapat diamati selama periode penelitian.

Pada awalnya, kondisi ini seperti *concidental compliance*, karena komitmen nasional Swedia terhadap mitigasi emisi gas rumah kaca yang sudah berjalan sebelumnya. Namun hasil penelitian menunjukan bahwa setelah EGD diluncurkan, pemerintah Swedia tidak hanya berhenti pada keselarasan *concidental compliance,* melainkan secara aktif menyesuaikan kembali arah implementasi kebijakan nya. Swedia melakukan penyesuain terhadap revisi target ESR, penyesuain terhadap EU ETS, serta integrasi LULUCF yang telah ditetapkan Uni Eropa ke dalam strategi mitigasi nasional.

Terjadinya perubahan pemerintahan pada akhir 2022, ketika koalisi liberal-konservatif yang didukung *sverigedemokraterna* yang berkuasa di Swedia terjadinya penurunan arah kebijakan di Swedia seperti penurunan pajak bahan bakar fosil dan pelanggaran kewajiban campuran biofuel. Dari perubahan ini bisa dilihat bahwa kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional bersifat dinamis dan bisa berubah seiring waktu, yang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan pergeseran orientasi politik pemerintah yang berkuasa. Meskipun demikian, adanya kritik terbuka dari Dewan Kebijakan Iklim terhadap kebijakan tersebut justru menegaskan bahwa mekanisme akuntabilitas domestik Swedia tetap berfungsi sebagai instrumen korektif yang menjaga arah kebijakan negara tetap sesuai dengan komitmen awal Swedia terhadap perubahan iklim dan komitmen internasionalnya. Hal ini, membedakan antara *treaty induce compliance* dan *coincidental compliance*.

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa kepatuhan Swedia terhadap kerangka kebijakan EGD dalam mitigasi emisi gas rumah kaca tahun 2019-2025 berada pada kategori *treaty induce compliance*, sebagaimana argumen sementara. Hal ini, memperkuat pemahaman bahwa dalam teori *compliance theory* Mitchell, kepatuhan sebuah negara bukanlah kondisi yang tetap dan terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil interaksi dinamis antara komitmen internasional, kapasitas kelembagaan domestik dan dinamika politik dalam negeri. Dalam kasus Swedia memperlihatkan bahwa negara yang secara historis menjadi pelopor kebijakan lingkungan tetap rentan terhadap pergeseran preferensi domestik yang dapat mengancam implementasi komitmen internasionalnya. Keberadaan *climate act*, Dewan kebijakan iklim dan tekanan dari keanggotaan Uni Eropa terbukti berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang yang menjaga Swedia tetap berada pada jalur kepatuhan meskipun terjadinya perubahan arah politik domestik Swedia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan internasional idealnay tidak dipahami semata sebagai hasil akhir yang tunggal, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang senantiasa diuji oleh dinamika politik dalam negeri suatu negara.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan waktu dan kedalaman data kuantitatif, melihat pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan studi literatur sekunder. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam analisis dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed method*

untuk mengukur secara lebih presisi korelasi antara perubahan kebijakan domestik dan capaian penurunan Swedia pasca 2022.

Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan melakukan studi komparatif antara Swedia dan negara Uni ERopa lain yang memiliki karakteristik politik domestik yang berbeda, seperti Denmark sebagaimana disinggung dalam penelitian Backstrand (2025), untuk memperkaya pemahaman mengenai pemahaman mengenai bagaimana bagaimana variasi sistem politik dan tata kelola demokratis mempengaruhi tingkat kepatuhan negara terhadap kerangka kebijakan iklim regional seperti EGD.

DAFTAR PUSTAKA

A Polycentric Approach for Coping with Climate Change. 2010. https://hdl.handle.net/10986/9034.

Bäckstrand, Karin. 2025. "Democracy and the Implementation of the European Green Deal: Comparing Denmark and Sweden." Journal of European Integration 47 (February): 277–97. https://doi.org/10.1080/07036337.2025.2459298.

Basis Data Hukum Kantor Pemerintah." n.d. Accessed July 21, 2026. http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2017:720.

BBC News Indonesia. (BBC News Indonesia). 2024. "Krisis iklim: 2023 jadi tahun terpanas sepanjang sejarah, apa yang perlu diwaspadai tahun ini?" Januari 14. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8722p5pgrmo.

BBC News Indonesia. 2024. "Krisis iklim: 2023 jadi tahun terpanas sepanjang sejarah, apa yang perlu diwaspadai tahun ini?" Januari 14. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8722p5pgrmo.

Bodansky, Daniel. n.d. The Legal Character of the Paris Agreement.

Bodansky, Daniel. n.d. The Legal Character of the Paris Agreement.

Buzan, Barry, Ole Waever, and Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Nachdr. Rienner.

Climate Policy Action Plan 2019 - Climate Change Laws of the World." n.d. Accessed July 21, 2026. https://climate-laws.org/documents/climate-policy-action-plan-2019_315c.

Consilium (Consilium). n.d. "Fit for 55." Accessed July 26, 2026. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fit-for-55/.

Consilium (Consilium). n.d. "Fit for 55." Accessed July 26, 2026. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fit-for-55/.

EEA. 2025. "Global and European Temperatures | European Environment Agency's Home Page." https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/global-and-european-temperatures.

EEA. 2025. "Global and European Temperatures | European Environment Agency's Home Page." https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/global-and-european-temperatures.

Effort Sharing 2021-2030: Targets and Flexibilities - Climate Action." n.d. Accessed July 28, 2026. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-removals-and-carbon-farming/effort-sharing-member-states-emission-targets/effort-sharing-2021-2030-targets-and-flexibilities_en.

Ejdys, Joanna, and Danuta Szpilko. 2022. "European Green Deal – Research Directions. A Systematic Literature Review." *Economics and Environment* 81 (2): 2. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.455.

European Commission. 2019. "The European Green Deal - European Commission." https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

European Commission. 2019. "The European Green Deal - European Commission." https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-g(PDF). n.d. "Compliance Theory by Mitchell.Pdf." Accessed September 11, 2025. https://drive.google.com/file/d/1GZn55DqqO0hKWEcb_GkvVZYuHLIT3gcC/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

European Commission. Joint Research Centre. 2020. *Global Warming and Drought Impacts in the EU: JRC PESETA IV Project : Task 7*. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2760/597045.

European Commission. Joint Research Centre. 2020. Global Warming and Drought Impacts in the EU: JRC PESETA IV Project : Task 7. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2760/597045.

Fetting, Constanze. 2020. THE EUROPEAN GREEN DEAL.

Floods in North Jutland, Denmark after 100 Mm of Rain in One Day – FloodList." n.d. Accessed December 15, 2025. https://floodlist.com/europe/floods-north-jutland-denmark.

Floods in North Jutland, Denmark after 100 Mm of Rain in One Day – FloodList." n.d. Accessed December 15, 2025. https://floodlist.com/europe/floods-north-jutland-denmark.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9388.1993.tb00133.

IEA (IEA). 2019. "Global Energy & CO2 Status Report 2019 – Analysis." March 26. https://www.iea.org/reports/global-energy-co2-status-report-2019.

IEA. 2019. "Global Energy & CO2 Status Report 2019 – Analysis." March 26. https://www.iea.org/reports/global-energy-co2-status-report-2019.

IPCC. 2014. AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 — IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/.

IPCC. n.d. Perubahan Iklim Meluas, Cepat, Dan Semakin Intensif – IPCC — IPCC. Accessed June 28, 2026. https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/.

Klimatpolitiska Rådet | Swedish Climate Policy Council." n.d. Accessed August 1, 2026. https://www.klimatpolitiskaradet.se:443/en/.

Klimatpolitiska Rådets Rapport 2023." n.d. Accessed July 26, 2026. https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2023/05/krrapport2023english11maj.pdf.

Klimatpolitiska Rådets Rapport 2024." n.d. Accessed July 26, 2026. https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2024/06/reportoftheswedishclimatepolicycouncil2024.pdf.

Law and Climate Change Toolkit |." n.d. Accessed June 28, 2026. https://climatelawtoolkit.org/legislation/720/articles/.

Lidskog, Rolf, and Ingemar Elander. 2012. "Ecological Modernization in Practice? The Case of Sustainable Development in Sweden." Journal of Environmental Policy & Planning 14 (December): 411–27. https://doi.org/10.1080/1523908X.2012.737234.

Local Sweden. (The Local Sweden). 2021. "'We Don't Have Much Time to Waste': How Will Climate Change Affect Sweden?" August 18. https://www.thelocal.se/20210818/we-dont-have-much-time-to-waste-how-will-climate-change-affect-sweden.

Metcalf, Gilbert E., and James H. Stock. 2020. "Measuring the Macroeconomic Impact of Carbon Taxes." AEA Papers and Proceedings 110 (May): 101–6. https://doi.org/10.1257/pandp.20201081.

Naturvardsverket. 2025. "Sweden's Climate Act and Climate Policy Framework." https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/sveriges-klimatarbete/swedens-climate-act-and-climate-policy-framework/.

Regeringens skrivelse 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan - hela vägen till nettonoll. n.d.

Regeringskansliet, Regeringen och. 2018. "Sweden's Carbon Tax." Text. Regeringskansliet, Regeringen och Regeringskansliet, February 26. https://www.government.se/government-policy/taxes-and-tariffs/swedens-carbon-tax/.

Regeringskansliet, Regeringen och. 2021. "Sweden's Climate Policy Framework." Text. Regeringskansliet, Regeringen och Regeringskansliet, March 11.

https://www.government.se/articles/2021/03/swedens-climate-policy-framework/'

Regeringskansliet, Regeringen och. 2023. "EU Fit for 55 Climate Package a Milestone in Climate Action." Text. Regeringskansliet, Regeringen och Regeringskansliet, July 5. https://www.government.se/articles/2023/07/eu-fit-for-55-climate-package-a-milestone-in-climate-action/.

Riksdagen. n.d. "THE ENVIRONMENTAL CODE." Accessed June 28, 2026. https://data.riksdagen.se/dokument/GOB461.

Ronald B Mitchell. *Compliance Theory Compliance, Effectiveness and Behaviour Change in International Environmental law,* University Press, 2007, 893-921

Rybski, Robert. 2022. "Energy in the European Green Deal: Impacts and Recommendations for MENA Countries." SSRN Scholarly Paper No. 4637961. Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=4637961.

Swedish Sverige. 2025. "Sweden's journey towards net zero in 2045." Explore Sweden. https://explore.sweden.se/sweden-the-climate-matchmaker/swedens-journey-towards-net-zero-in-2045.

The Swedish Environmental Code." n.d. Accessed June 28, 2026. https://www.government.se/contentassets/be5e4d4ebdb4499f8d6365720ae68724/the-swedish-environmental-code-ds-200061/.

Total greenhouse gas emissions (without LULUCF)." 2025. September 28. https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025/countries/sweden/total-greenhouse-gas-emissions.

United Nations Indonesia. n.d. "Apa Itu Perubahan Iklim? | Perserikatan Bangsa - Bangsa di Indonesia." Accessed June 29, 2026. https://indonesia.un.org/id/172909-apa-itu-perubahan-iklim.

Vela Almeida, Diana, Vijay Kolinjivadi, Tomaso Ferrando, et al. 2023. "The 'Greening' of Empire: The European Green Deal as the *EU First* Agenda." *Political Geography* 105 (August): 102925. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102925.

WWF. 2020. "68% Average Decline in Species Population Sizes Since 1970, Says New WWF Report." World Wildlife Fund. https://www.worldwildlife.org/press-releases/68-average-decline-in-species-population-sizes-since-1970-says-new-wwf-report?utm_source=.reen